

Mengenal 5 Jenis Warna Surat Suara Pemilu 2024

Ketentuan terkait kertas surat suara tertuang dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum.

Jakarta, SMN - Surat suara yang telah disediakan oleh KPU merupakan salah satu bagian penting dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). Surat suara biasanya tersedia di Tempat Pemilahan Suara (TPS) yang telah diatur berdasarkan peraturan dan ketentuan yang ada.

Ketentuan terkait kertas surat suara tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum.

Bersambung di Hal. 11

5 DESAIN SURAT SUARA PADA PEMILU TAHUN 2024

- SURAT SUARA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN (Ditandai warna ABU-ABU)
- SURAT SUARA DPR RI (Ditandai warna KUNING)
- SURAT SUARA DPD RI (Ditandai warna MERAH)
- SURAT SUARA DPRD PROVINSI (Ditandai warna BIRU)
- SURAT SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA (Ditandai warna HIJAU)

Sumber: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1202 Tahun 2023 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Tunanetra dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

www.kpu.go.id | kpu_ri | KPU Republik Indonesia | @KPU_ID | KPU RI

5 Jenis surat suara yang digunakan di Pemilu 2024

Dewan Pers Ajak Capres-Cawapres Deklarasikan Komitmen Pada Kemerdekaan Pers



Penyampaian deklarasi sebagai komitmen itu akan diselenggarakan pada 7 Februari 2024 di Hall Dewan Pers Jakarta

Jakarta, SMN - Dewan Pers mengajak ketiga capres-cawapres untuk menyatakan komitmen mereka terhadap kemerdekaan pers. Penyampaian deklarasi sebagai komitmen itu akan diselenggarakan pada 7 Februari 2024 di Hall Dewan Pers Jakarta.

Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu mengutarakan di depan tim pemenangan paslon di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu (17/1/2024). Menurut Ninik bahwa deklarasi kemerdekaan pers ini bu-

Bersambung di Hal. 11

Kemenkominfo, BNN dan Diskominfo Jatim Ajak Masyarakat dan ASN Perangi Narkoba

Surabaya, SMN - Meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN), untuk terlibat aktif dalam upaya pemberantasan peredaran narkoba, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) RI, Kominfo Pemerintah Jatim, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) menggelar Forum Literasi Politik, Hukum, dan Keamanan



Forum Literasi Politik, Hukum, dan Keamanan Digital (FIRTUAL) dengan tema "War on Drugs"

Digital (FIRTUAL) dengan tema "War on Drugs", di Fairfield By Marriott Hotel Surabaya, Rabu (24/1/2024).

Sebagai pembicara forum literasi tersebut adalah Deputi Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Irje Pol Richard M Nanggolan dan Kepala Dinas Kominfo Jatim Sherlita Ratna Dewi Agustin dan

Bersambung di Hal. 11

Diskominfo Jatim Gelar Desk Keterisian Data 2023 - Review Daftar Data 2024

Sidoarjo, SMN - Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Desk Keterisian Data Tahun 2023 dan Review Daftar Data Tahun 2024, 24 - 25 Januari 2024 di Aston Hotel Jl. Kahuripan Raya Sidoarjo.

Dalam kegiatan yang merupakan Forum Statistisi ini diikuti oleh 75 peserta unsur operator dan verifikasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov



Kepala Dinas Kominfo Jatim Sherlita Ratna Dewi Agustin saat memberikan Pengarahan Desk Keterisian Data 2023 dan Review Daftar Data 2024.

Jatim. Rapat yang difasilitasi oleh Dinas Kominfo Jatim sebagai Wali Data ini diharapkan dapat mendukung penyediaan data dan metadata di portal Satu Data Jawa Timur serta menetapkan daftar data yang memenuhi kualifikasi data terbuka untuk dapat diakses dalam portal Open Data Jawa Timur sebagai bentuk pelayanan publik.

Bersambung di Hal. 11

Bupati Sugiri Bangun Puskesmas di Desa Selur, Tapal Batas Ponorogo-Trenggalek



Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko bersama Kepala Desa Selur Suprpto dan Kepala Dinas Kesehatan Dyah Ayu Puspaningarti meninjau lahan calon puskesmas pembantu, Selasa (16/1/2024).

Ponorogo, SMN - Layanan kesehatan di Ponorogo semakin dekat dengan masyarakat. Bupati Sugiri Sancoko berencana mendirikan puskesmas pembantu (pustu) dilengkapi fasilitas rawat inap di Desa Selur Kecamatan Ngrayun yang berada di dataran tinggi. "Ponkesdes (pondok kesehatan desa) yang sudah ada akan kita

naikkan kelasnya menjadi puskesmas pembantu," kata Kang Bupati —sa-paan Bupati Sugiri— saat meninjau lahan seluas 0,5 hektare yang di atasnya akan berdiri pustu berfasilitas ruangan rawat inap itu, Selasa (16/1/2024).

Ketika fasilitas kesehatan memberikan layanan rawat inap, maka terdapat tenaga kesehatan terdiri

Bersambung di Hal. 11

Targetkan Zero New Stunting 2024, Pj Wali Kota: Upaya Pemkot Ciptakan Generasi Unggul



Pj Wali kota Mojokerto saat menerima penghargaan IGA tahun 2023 oleh Mendagri, sebagai Kota Terinovatif atas inovasi Canting Gulo Mojo, salah satu program terintegrasi untuk menekan angka stunting

Kota Mojokerto, SMN - Pemkot Mojokerto konsisten menunjukkan komitmen dalam upaya mewujudkan Zero New Stunting di tahun 2024. Terlihat dari kehadiran berbagai aksi dan program, dengan tidak hanya melibatkan berbagai stakeholder di lingkup pemkot, melainkan juga instansi vertikal dan warga. "Dengan gizi yang terpenuhi sedari dini tumbuh kembang anak akan optimal. Sehingga kita tancap gas agar balita dan anak-anak Kota Mojokerto bebas dari stunting. Dengan harapan akan tercipta generasi unggul dan cemerlang di

Bersambung di Hal. 11



Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati saat meresmikan jembatan pertanian desa Tempuran kecamatan Sooko

Tanggulangi Banjir, Bupati Mojokerto Resmikan Jembatan Pertanian Desa Tempuran Sooko

Kab. Mojokerto, SMN - Peresmian jembatan di aliran sungai Avour Jombok itu dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk menanggulangi banjir yang kerap melanda desa

Bersambung di Hal. 11

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI

5 hal yang perlu diperhatikan dalam tahapan Kampanye

- Politik Uang**
Politik uang merupakan upaya mempengaruhi perilaku orang lain atau pemilih dengan menggunakan pemberian uang, barang, maupun hadiah. Tolak Politik Uang!
- Politisasi SARA**
Politisasi SARA mengakibatkan masyarakat terpolarisasi. Hal ini diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 280 ayat 1c, adapun sanksi yang diberikan sesuai dengan UU No 7 Tahun 2017 Pasal 521 yaitu pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- Netralitas ASN**
ASN sebagai pelayan masyarakat diwajibkan menjaga netralitas selama Pemilu berlangsung. Hal ini tercantum dalam UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 280 ayat 3. Pelanggaran terhadap netralitas ASN tercantum dalam UU No 7 Tahun 2017 Pasal 494 dengan sanksi pidana kurungan paling lama 1 Tahun dan denda paling banyak sebesar Rp 12.000.000.
- Stop Ujaran Kebencian Dan Hoax**
derasnya arus informasi membuat berita semakin tak terkendali, pada masa pemilu ini, masyarakat dituntut untuk kritis dan teliti pada setiap informasi yang diterima. Agar tidak terprovokatif karena ujaran kebencian dan hoaks
- Alat Peraga Kampanye**
Ketertiban pemasangan APK harus diperhatikan selama kampanye Pemilu berlangsung. Hal ini diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 tahun 2023 yang menjelaskan tentang ketentuan dan larangan terkait pemasangan APK.

Kami Bawaslu Kabupaten Kediri berkomitmen untuk mengawasi dan mewujudkan Pemilu 2024 tanpa pelanggaran. Dalam implementasinya diperlukan keterlibatan seluruh elemen. Kami bersama-sama mengajak masyarakat untuk mendukung dan mengawasi Pemilu 2024 tanpa pelanggaran.

BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU
BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN

Bupati Muratara Salurkan 2000 Paket Sembako kepada Masyarakat Terdampak Banjir Bandang



Bupati Muratara Devi Suhartoni menyerahkan bantuan sembako kepada warga terdampak banjir

Muratara, SMN - Paguyuban Putra Jawa Keturunan Sumatera (Puja Kesuma) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) memberi bantuan paket sembako untuk masyarakat terdampak banjir di wilayah

Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara).

Jumlah paket sembako yang di serahkan mencapai 2000 paket, Selasa (16/1/2024).

Paket sembako tersebut diserahkan Sekjen Puja Kesuma

Provinsi Sumsel M Joko Bagus kepada Bupati Muratara, H Devi Suhartoni, didampingi Asisten I, Alfirmansyah Karim, Asisten II Suharto Patih dan Asisten III, Duman Faisyal serta Kepala BPBD Muratara,

Zainal Arifin Daud, di kantor BPBD Muratara.

Bupati Muratara, H Devi Suhartoni, mengucapkan terima kasih kepada sekjen puja kesuma Sumatera Selatan yang telah memberikan bantuan untuk masyarakat Muratara yang terdampak banjir.

Bantuan yang diberikan berupa paket sembako diserahkan ke Pemkab Muratara melalui BPBD Muratara akan diberikan kepada enam kecamatan yang terkena banjir.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Muratara Zainal Aripin menjelaskan pemerintah kabupaten Muratara telah menghimbau kepada pemerintah kecamatan dan desa supaya membuat dapur umum untuk membantu warga yang terdampak banjir.

"Alhamdulillah sudah dipersiapkan di desa dan untuk keca-

matan Ulu Rawas itu camatnya langsung turun tangan membentuk dapur-dapur umum dan itu sudah kita distribusikan untuk seluruh yang terdampak banjir. Tidak ada pilih-pilih," jelasnya.

Berdasarkan pantauan dan informasi update ketinggian air masih ada yang mencapai 1 meter ada yang 1,80 cm tapi kalau untuk Kecamatan Karang dapo ini sudah bisa dilalui.

Untuk wilayah kecamatan Rawas Ilir belum bisa dilalui, begitu juga dengan kecamatan Nibung itu cuma bisa masuk ke kelurahan untuk ke desa-desa lainnya belum. cuaca juga saat ini menurut BMKG untuk saat ini ini mungkin katekanlah yang tertinggi diprediksi di bulan maret nanti.

Berdasarkan perkiraan BMKG bahwa perkiraan bulan Februari mengingat cuaca ekstrim ini kadang-

kadang berubah kita lihat aja sekarang siang panas malamnya hujan sorenya hujan, tapinya belum bisa dipastikan bahwa ada seperti apa ya belum bisa dipastikan tapi perkiraannya itu di bulan maret akan terjadi yang tinggi lagi jelasnya.

Sementara itu Sekjend Puja Kesuma Provinsi Sumsel, M Sujoko Bagus mengatakan bantuan ini merupakan bentuk

kepedulian warga Puja Kesuma Provinsi Sumsel.

"Yang terdampak banjir harus bersabar menghadapi bencana banjir ini. Dan bantuan ini juga dari Prabowo Subianto-Gibran. Intinya beliau peduli. Salam dari beliau berdua yang terdampak sehat dan sabar dan tetap bertakwa kepada Allah SWT," pungkasnya. (zil/adv)



Kepala BPBD Muratara, Zainal Arifin Daud

Gubernur Jawa Timur Resmikan 68 Huntara di Balerejo Blitar

Blitar, SMN - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, meresmikan 68 Unit Hunian Sementara (Huntara) di Desa Balerejo, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, Kamis (25/01/2024).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blitar, Izul marom, mewakili Bupati Blitar, Rini Syarifah, juga hadir mendampingi Gubernur pada peresmian tersebut. Tampak hadir juga Kalaksa BPPD Provinsi Jawa Timur, jajaran Forkopimda Kabupaten Blitar, OPD Terkait dan Muspika Kecamatan Panggungrejo.

Dalam pidatonya, Gubernur Khofifah menyampaikan, bahwa pembangunan Huntara adalah langkah strategis pemerintah untuk memberikan perlindungan dan keselamatan, terutama bagi warga Kabupaten Blitar di wilayah selatan yang rentan terhadap permasalahan tanah gerak.

"Pembangunan Huntara ini merupakan bentuk perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten dan Provinsi, ditempatkan di atas lahan Pemerintah Kabupaten Blitar. Saya hadir hari ini untuk secara resmi meresmikan Huntara ini," ungkapnya.

Khofifah juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian dalam menghadapi segala cuaca. Karena sesuai dengan data wilayah Jawa Timur, Kabupaten Blitar termasuk wilayah yang sering menerima curah hujan dengan intensitas tinggi yang bisa mengakibatkan tanah longsor.



Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat acara peresmian Huntara

"Saya minta kepada seluruh masyarakat untuk berhati-hati serta lebih waspada dalam menyikapi cuaca ekstrem," imbuhnya.

Di tempat yang sama, Sekda Izul menyampaikan rasa terima kasih kepada Gubernur Jawa Timur beserta seluruh pihak yang turut serta dalam peresmian Huntara. Ia menjelaskan rincian alokasi Huntara mencakup 47 unit di Desa Balere-

jo, 11 unit di Desa Maron, Kecamatan Kademangan, dan 10 unit di Desa Kalitengah.

Gubernur Jawa Timur juga secara simbolis meresmikan Jembatan Resapombo yang ada di Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar. Hal ini menandakan komitmen pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur guna mendukung kesejahteraan masyarakat. (mam)

Dandim 0808/Blitar, Berikan Sosialisasi dalam Rangka Mendukung Netralitas TNI pada Pemilu 2024 Kepada Persit KCK Cabang XXII

Blitar, SMN - Dalam rangka mendukung netralitas TNI pada Pemilu Tahun 2024, Dandim 0808/Blitar Letkol Inf Sapto Dwi Priyono, S.E., didampingi Ketua Persit KCK Cabang XXII Ny. Vivi Sapto Dwi Priyono, memberikan sosialisasi kepada Persit Kartika Chandira Kirana Cabang XXII Dim 0808.

Acara ini, diselenggarakan bertempat di Aula Shodancho Soeprijadi Jl. A. Yani No. 06 Kel/ Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar, Kamis (25/1/2024).

Dalam kesempatan tersebut Dandim 0808 menegaskan, kegiatan sosialisasi hari ini sesuai dengan Surat Telegram Pangdam V/Brawijaya Nomor ST/74/2024 tanggal 18 Januari 2024, tentang sosialisasi dan penekanan kembali kepada seluruh anggota Persit yang tidak mencalonkan sebagai anggota Legislatif, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terkait Netralitas TNI pada Pemilu 2024.

Lebih lanjut orang nomor satu di Kodim 0808 ini, menekankan

kepada anggota Persit KCK Cabang XXII Dim 0808 untuk :

1. Tidak terlibat aktif dalam kampanye baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Tidak menghadiri kegiatan yang bersifat untuk penggalangan suara.
3. Tidak memberikan fasilitas/sarana apapun kepada pihak-pihak yang sedang melaksanakan kampanye.
4. Menjaga integritas, kredibilitas dan bertanggung jawab secara moral untuk mendukung netralitas.

Saya yakin dan percaya ibu-ibu sudah paham dan mengerti apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Ikuti aturan yang ada dan apabila ada permasalahan selesaikan dengan bijak.

Karena sebentar lagi ada kampanye, lebih baik tahan diri, yang sudah benar saja salah apalagi salah. Apabila dijalan bertemu rombongan kampanye, lebih baik menepi menunggu sampai lewat, serta hati-hati dan bijak



Suasana Sosialisasi yang diselenggarakan bertempat di Aula Shodancho Soeprijadi Jl. A. Yani No. 06 Kel/Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar, Kamis (25/1/2024)

dalam bermedia sosial.

Dandim menambahkan, kegiatan sosialisasi ini juga untuk memberikan pemahaman kepada anggota Persit KCK Cabang XXII Dim 0808, tentang peran TNI dalam mendukung pelaksanaan Pemilu yang damai, jujur dan adil sesuai dengan prinsip demokrasi.

Dengan adanya sosialisasi ini, semoga dapat menjadi momentum untuk memperkuat pemaha-

man tentang netralitas TNI dan menciptakan kesadaran kolektif dalam mendukung pelaksanaan Pemilu yang demokratis dan damai.

Selain itu, upaya ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam memelihara kenyamanan, ketertiban, serta keamanan selama proses Pemilu berlangsung. (mam)

JAGA DESIGN

Hub :
082231838798

Mengerjakan

Nota, Banner, Vandel, Spanduk, Souvenir dll

Kantor Pusat: Dsn Temboro Ds. Ploasan Kec. Wates Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kantor Redaksi: Jl. Brigjend Pol. Imam Bachri No.143 Pesantren - Kota Kediri, Jawa Timur. Telp./Fax: (0354) 2897707. Penanggung Jawab & Penasehat Hukum I: Rahmat Ardianto, SH. Dewan Penasehat: KH. Drs. Imam Yahya Malik/ Gus Yahya (Pompes Al Makruf Kedong Lo Kediri). Ombosman : Mujiyanto SE. Komisaris Utama: Dimas Bekti S. Direktur Utama: Winarti. Wakil Direktur: Kanti Wiyoto. Pimpinan Redaksi/Penanggung Jawab: Kundari Pri S. Wakil Pimred: Yon Taufik Hidayat. Bendahara/Keuangan: Yusuf Maulana. Administrasi: Susiani Dewan Redaksi: Kanti, Winarti. Redaktur Pelaksana: Kundari Pri Susanti S.T., Hartono Basingkem, Mardianto, Setiawan. Redaktur: Agus Imam S, Dimas Bekti S. Humas: Futi'ah SE. Fotografer: Wendy Eko Winarto. Desain/Layout: Taufik Ismail, Yusuf, Achmad Syafi'i. Manager Marketing: M. Eddy Fathurokum, M. Yusuf Maulana. Marketing: Kharis Abdullah, Irwan (Freelance). Kepala Koordinator Liputan Jawa Timur: C. Junaedi. Crew dan Wartawan: Kota/Kab. Kediri: Agus Wahyu, Pugh Santoso. Blitar Kota/Kab : Agus Imam S. Tulungagung/Trenggalek : Yusuf. Bangkalan, Pamekasan, Sampang: Wahyudi Hermawan. Surabaya : Ahmadi Mojokerto : Slamet W. Jombang : Puji, Arif, Nganjuk : E. Widyantoro, BF Agung W. Madiun/Ponorogo : Drs. Suyanto. Ngawi: Kundari Pri Susanti S.T. Kota/Kab. Probolinggo: Edi Sunarko R.D. Lumajang : Rochimawati. Perwakilan Jawa Tengah : Suroto Anto S. Kab. Rembang : Orsal. Bandung: Aldi R Panjaitan. Biro Sukabumi: Roby Cahyadi (biro). Malang Raya : Henny. Perwakilan Kaltim dan Kaltara : Syahraini. Kabupaten Karimun : Tumbul Maradona. H. Biro Tanjung Pinang : J. Parliungan Hutasoit. Sulawesi Selatan : Andi M. Batam: Parulian Halomoan Sipayung. Perwakilan Riau : Marudut Daud Purna. Kab.Mukomuko : Burhanudin (Kabiro). Koordinator Wartawan Jakarta : Parulian Tambun. Perwakilan Sumatera Utara : Jobni Roha. Kabiro Depok dan Bogor: Diddy Kurniawan. Kabiro Kab. Asahan : Imran Nasution. Bengkalis : Hendra (Kabiro), Ervan, Andi W. Labuhanbatu Raya : Samsul Bahri (Kabiro), Sanimin. Lampung : Yuliar (Kabiro), Musi Rawas Utara : Tanzil (Kabiro)

No.Rekening Bank BRI Capem Wates Kabupaten Kediri. Norek. 2289-01-000474-30-2 A/N Suara Media Nasional Bersinar. No.Rekening Bank Jatim Cabang Kediri Norek. 0061042661 A/N Suara Media Nasional Bersinar PT. Website : www.suaramedianasional.co.id. Email : suaramedianasional@gmail.com. Percetakan : PT. Aksara Grafika Surabaya, Alamat Percetakan : Jl. Brigjend Katamsno No. 45, Waru Sidoarjo Jawa Timur. Telp. (031) 8678308. Isi diluar tanggung jawab percetakan.. Waspada! Waratawan Suara Media Nasional yang memegang Kartu Press yang namanya tidak tercantum dalam BOK REDAKSI bukan tanggung jawab Redaksi. Bila Anda ingin berlangganan, Keluhan serta Informasi. Bisa mengirim surat untuk redaksi kami dengan identitas diri ke Kantor Pusat "SUARAMEDIA NASIONAL" di Dusun Ploasan Desa Ploasan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Telp. Fax. (0354) 2897707, 082331999509, 085645867811. Admin SMN : 081230908358. Kami hanya memuat iklan berdasarkan order yang masuk dari pemasang iklan dan bila mana ada iklan yang tidak tercantum harap menghubungi kantor redaksi "SUARAMEDIA NASIONAL". Tidak dibenarkan meminta imbalan sesuatu dari narasumber.

Semua Wartawan SKU Suara Media Nasional dilengkapi dengan Kartu Pers Surat Tugas, Surat Penempatan dan tercantum didalam box redaksi di atas. Kami mohon kepada sumber berita supaya bijak dan teliti untuk menanyakan identitas wartawan yang datang. Wartawan SKU Suara Media Nasional dalam menjalankan tugas dilengkapi dengan tanda pengenal, dilarang terima suap, punya hak tolak jawab, dilarang melakukan pengancaman dan pemerasan, dilarang terlibat aktivitas kriminal. Jika ada yang mengatasnamakan SKU Suara Media Nasional namun tidak tercantum dalam Box Redaksi atau ada tindakan yang dinilai merugikan pihak lain dengan tindakan melanggar hukum positif Indonesia, dapat menghubungi kontak yang tersedia. Wartawan SKU Suara Media Nasional tidak diperkenankan menerima dan atau meminta imbalan dengan alasan apapun dari Narasumber. TIDAK TERCATAT DI DALAM BOX REDAKSI INI BUKAN WARTAWAN KAMI!!!

"Jika pers merugikan, jangan main hakim sendiri, gunakan hak jawab atau adukan ke Dewan Pers"
Pesan ini disampaikan Suara Media Nasional (Dewan Pers).

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8. Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110 Telp. (021) 35214874, 3504874-75. Fax. (021) 3452030
Email : dewanpers@cbn.net.id. Twitter : @dewanpers.or.id / www.persscouncil.or.id

DPRD Kabupaten Pekalongan Ajukan Raperda Inisiatif Tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan



DPRD Kabupaten Pekalongan menggelar rapat paripurna

Kab. Pekalongan, SMN - DPRD Kabupaten Pekalongan mengajukan raperda inisiatif tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan, disampaikan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Pekalongan, Senin 8 Januari 2024.

Rapat paripurna ini dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Hindun, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Sumar Rosul, anggota DPRD Kabupaten Pekalongan dan unsur Forkompinda. Dari eksekutif tampak hadir Sekda M Yulian Akbar dan kepala OPD. Rapat paripurna ini tak dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan.

Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Hindun menyampaikan, pengajuan raperda tersebut merupakan wujud dan semangat DPRD Kabupaten Pekalongan dalam melaksanakan peraturan daerah. Menurutnya, tata cara dan prosedur pembentukannya telah diatur da-

lam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Hindun pun memberi penjelasan berkaitan dengan Raperda Inisiatif DPRD tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.

Disampaikan, bahwa pengaturan mengenai hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman dalam rangka penyediaan atau pemberian penghasilan tetap dan tunjangan komunikasi intensif, belanja penunjang operasional pimpinan, tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), berdasarkan asas efisiensi, efektifitas, transparansi, dan bertanggung jawab dengan tujuan agar lembaga DPRD dapat mening-

katkan kinerjanya sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

"Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada 13 Januari 2023, serta penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, maka Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, muatan yang mengatur mengenai hal keuangan dan Administratif Anggota DPRD telah dilakukan beberapa perubahan," ujarnya.

Seiring dinamika perkembangan terkait pengaturan tentang hak keuangan dan administrasi Pimpinan dan anggota DPRD, lanjut dia, Pemkab Pekalongan telah memiliki Perda Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Admin-

istratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.

Namun dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diperlukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.

Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan antara lain mengenai ketentuan terkait sinkronisasi kendaraan perorangan dinas yang digunakan oleh Pimpinan DPRD, pemindahtanganan kendaraan

perorangan dinas yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan pembatasan jangka waktu pengembalian rumah negara dan kendaraan perorangan dinas.

"Berdasarkan latar belakang dan pertimbangan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan memandang perlu untuk memberikan pedoman dan dasar hukum atas penyelenggaraan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan, dengan menetapkan

Kabupaten Pekalongan kepada Bupati Pekalongan untuk dilakukan pembahasan bersama dengan organisasi perangkat daerah terkait.

Selanjutnya Bupati Pekalongan Fadia Arafiq melalui Wakil Bupati Pekalongan Riswadi mengapresiasi adanya Raperda Inisiatif Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan Anggota DPRD. Pendapat itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan di Ruang Paripurna DPRD setempat, Rabu, 24 Januari 2024.

Rapat Paripurna DPRD Ka-

Perwakilan Rakyat, maka Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan Anggota DPRD perlu untuk disesuaikan.

"Oleh karena itu, kami menyambut baik inisiatif DPRD atas penyusunan raperda tentang perubahan atas Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan Anggota DPRD," ujar Riswadi.

Penyusunan raperda itu sebagai upaya untuk meningkatkan peran, tanggung jawab dan untuk mewujudkan keadilan serta kesejahteraan masyarakat.



Rapat paripurna digelar di Gedung DPRD Kabupaten Pekalongan, Senin 8 Januari 2024

Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan," tandasnya.

Setelah melalui serangkaian tahapan pembentukan produk hukum daerah, pada paripurna itu DPRD sampaikan Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan sebagai Raperda Inisiatif DPRD

bupaten Pekalongan dipimpin oleh Ketua DPRD, Hindun, didampingi wakil pimpinan. Rapat paripurna dihadiri Forkompinda, perangkat daerah dan tamu undangan.

Dalam rapat paripurna itu, Wakil Bupati Pekalongan Riswadi menyampaikan beberapa hal sebagai saran dan masukan guna penyempurnaan raperda dalam pembahasan selanjutnya.

Riswadi juga menyampaikan, dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan Dan Anggota Dewan

DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah diharapkan mampu membawa nilai-nilai demokratis dan memperjuangkan aspirasi daerah.

"Sebagaimana telah disampaikan bahwa tujuan dari penyampaian raperda ini salah satu diantaranya untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi DPRD. Kami mengimbau bagi seluruh perangkat daerah terutama yang melaksanakan urusan di bidang keuangan untuk dapat mendukung dan membantu penyusunan raperda ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat diimplementasikan," pungkasnya. (ADV)



Suasana rapat paripurna DPRD Pekalongan yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Pekalongan, Senin 8 Januari 2024



Goa Selomangkling Kediri



Simpang Lima Gumul Kediri

Sempat Viral, Ini Nasib Guru SD Honorer Setelah Bertemu Masbup

Kediri, SMN - Masih ingat dengan guru honorer di Kabupaten Kediri yang menggunakan gajinya untuk membantu membelikan peralatan sekolah siswanya. Kebaikan guru honorer itu pun pada akhir 2022 lalu sempat viral di jagat maya.

Marga Cistha, nama guru itu tercatat sebagai pengajar di SD Negeri Tiru Lor 2, Kecamatan Gurah sejak tahun 2021. Kegiatan keseharian bersama siswa biasa dibagikan ke media sosial Tiktok.

Kebiasaannya dalam membantu sesama rupanya diperhatikan Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana. Pada Senin (15/1), Marga begitu sapaan guru honorer itu diundang bupati ke Kantor Pemkab Kediri.

"Bagaimana mas kok bisa keren banget itu, gimana ceritanya sampai belikan anak anak peralatan sekolah?," tanya Mas Dhito, sapaan akrab bupati saat pertama kali bertemu Marga.

Didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Mokhamat Muhsin dan kepala sekolah di tempatnya mengajar, Marga mengisahkan perjalanannya selama menjadi guru honorer.

Di sekolah, sejak awal mengajar Marga melihat ada siswanya mengenakan sepatu rusak. Dalam batin, sang guru merasa iba, hingga muncul niatan membelikan siswanya sepatu.

"Saya sisihkan gaji untuk membelikan sepatu," cerita Marga.

Sebagai guru honorer, Marga waktu itu mendapatkan gaji Rp200 ribu/bulan. Meski gajinya tak seberapa, ketulusannya dalam membantu membelikan peralatan sekolah siswanya tak



Sempat Viral, Ini Nasib Guru SD Honorer Setelah Bertemu Bupati Dhito

berhenti.

Setiap hari bertemu, dia semakin mengetahui kondisi anak didik di sekolahnya. Tak hanya sepatu, kadang dia membelikan buku, tas maupun peralatan sekolah lain kepada para siswanya.

Konten yang dibagikan di Tiktok pribadinya pun lambat laun dilihat banyak orang. Bahkan diakui bantuan yang disalurkan kini kerap datang dari para follower, maupun endorse yang masuk.

"Yang mau donasi biasanya DM ke saya mau bantu misal alat tulis nanti dikirim ke alamat saya," ucap Marga.

Tidak hanya kepada siswa di sekolah tempatnya mengajar, bantuan juga disalurkan bagi para siswa sekolah lain di Kabupaten Kediri.

Tak terbatas peralatan sekolah, bantuan juga divu-

judkan uang saku, sepeda maupun yang lain menyesuaikan kebutuhan siswa. Bahkan, sempat bantuan diberikan dalam bentuk komputer untuk sekolah termasuk renovasi rumah siswa.

Mendengar cerita itu, sebagai kepala daerah, Mas Dhito merasa bangga dan kagum dengan perjuangan yang dilakukan guru honorer itu. Tanpa campur tangan pemerintah, karena empatinya yang tinggi, Marga telah banyak membantu para siswa.

"Saya perlu orang yang bisa bekerja dengan ikhlas dan jujur, punya integritas," ungkap Mas Dhito.

Melihat nilai positif dan semangat pengabdian yang dilakukan, Mas Dhito menawarkan Marga untuk bergabung dalam tim yang membantu dirinya di Pemerintah Kabupaten Kediri.

Pun begitu, Marga tetap tidak dibatasi ketika masih berkeinginan untuk mengajar. Untuk itu, dia tidak

"Saya ingin angkat jenengan sebagai tenaga ahli bupati," kata Mas Dhito memberikan tawaran.

Mendapat tawaran dari orang nomor satu di Kabupaten Kediri itu, Marga pun mengaku bersedia bergabung sebagai tenaga ahli bupati.

Dengan kesediaan yang disampaikan, Mas Dhito berharap Marga nantinya dapat ikut membantu dalam mencari solusi atas persoalan yang harus dihadapi di pemerintahan. Tidak terbatas pada sektor pendidikan.

"Senang mendapatkan tawaran itu, semoga nanti bisa mendukung program beliau dan bisa membantu masyarakat yang lebih luas lagi," ucap Marga. (kmf/kan)

Pemkot Kediri Ajak Seluruh Elemen Masyarakat Ciptakan Pemilu 2024 Aman dan Kondusif



Hadiri Malam Keakraban PAUB-PK/ FKUB, Pemkot Kediri Ajak Seluruh Elemen Masyarakat Ciptakan Pemilu 2024 Aman dan Kondusif

Kota Kediri, SMN - Jelang pelaksanaan Pemilu 2024 yang semakin dekat, Pemkot Kediri mengajak seluruh elemen masyarakat seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi pemuda, Ormas dan Perguruan Tinggi menjaga agar Pemilu dapat terselenggara secara aman dan kondusif di Kota Kediri. Hal tersebut disampaikan oleh Asisten Pemerintah dan Kesra, Mandung Sulaksono dalam sambutannya saat menghadiri Malam Keakraban PAUB-PK / FKUB Kota Kediri bertempat di Aula Ponpes Wali Barokah, Rabu (24/1).

"Diluar sana banyak isu yang mengatakan suasana sudah mulai memanas jelang Pemilu, namun hari ini kita buktikan bahwa suasana tetap nyaman, guyub rukun, damai. Mari kita buat Pemilu di Kota Kediri tetap aman dan kon-

duusif," ungkapnya.

La tak memungkiri di masa-masa mendekati pelaksanaan Pemilu, banyak isu - isu yang dapat memecah belah masyarakat. Untuk itu, Mandung mengingatkan ada 3 hal yang perlu dilakukan PAUB -PK dan FKUB Kota Kediri untuk menjaga kerukunan di Kota Kediri tetap berjalan dengan baik.

"Poin pertama PAUB-PK dan FKUB harus dapat mendeteksi secara dini potensi-potensi gangguan yang dapat merusak kerukunan umat beragama. Kedua bersikap proaktif dalam menjaga dan mencegah perpecahan antar elemen bangsa terkait dengan isu-isu agama dalam setiap tahapan pemilu," ujarnya.

"Terakhir dapat menjadi mediasi serta mencari solusi dalam menanggulangi permasalahan yang muncul. Hal itu menjadi lang-

kah-langkah proaktif yang hendaknya dilakukan oleh PAUB-PK dan FKUB Kota Kediri," lanjutnya.

Tak lupa diakhir sambutan, Mandung mengajak seluruh masyarakat agar ikut menyelesaikan pelaksanaan Pemilu 2024 yang akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024 mendatang.

"Mari sama-sama gunakan hak untuk menyalurkan aspirasi kita dalam Pemilu 2024 nanti. Kami mengingatkan perbedaan pendapat itu wajar dan tidak perlu diperdebatkan," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua FKUB Kota Kediri Moh. Salim mengatakan Kota Kediri pada tahun 2022 menjadi Kota paling toleran kelima di Indonesia. Kondisi tersebut tak lepas dari peran seluruh aspek mulai dari Pemerintah, Instansi, Tokoh agama dan mas-

yarakat, ormas, akademisi yang senantiasa bekerja sama menjaga kerukunan antar umat beragama sehingga toleransi di Kota Kediri terjaga dengan baik.

Ia berharap kerjasama yang telah dijalin dapat terus berjalan dengan baik dan pelaksanaan Pemilu 2024 di Kota Kediri berjalan lancar, aman, kondusif, dan harmonis.

"Pertemuan ini semoga membawa hal positif demi keutuhan dan kerukunan NKRI. Mari kita bekerjasama agar Kota Kediri tetap aman, damai, kondusif dan harmonis," ucapnya.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan Deklarasi Pemilu Damai 2024 yang ditanda tangani seluruh Forkopimda, KPU, Bawaslu, dan FKUB dari berbagai lintas agama. (kmf/kan)

Pj Wali Kota Kediri Zanariah Tanam Pohon pada Ekspedisi Penyelamatan Mata Air di Sumber Cakarwesi

"Saya berharap kolaborasi ini terus berlanjut sampai mata air yang ada di Kota dan Kabupaten Kediri terus terpelihara." -Penjabat (Pj) Wali Kota Kediri Zanariah-

Kota Kediri, SMN - Penjabat (Pj) Wali Kota Kediri Zanariah menanam pohon di Sumber Cakarwesi. Penanaman pohon ini merupakan tahapan dari Ekspedisi Penyelamatan Mata Air, Selasa (23/1). Dimana Ekspedisi Penyelamatan Mata Air ini berlangsung sejak tahun 2023, yang diawali dengan tahap telusur sumber di Kota dan Kabupaten Kediri. Di Kota Kediri sendiri tercatat ada 27 mata air yang tersebar di 12 kelurahan. Dalam acara ini Zanariah juga melihat secara langsung sumber mata air Cakarwesi.

"Patut kita syukuri wilayah Kota dan Kabupaten Kediri yang diapit Gunung Kelud dan Pegunungan Wilis serta dilintasi Sungai Brantas berlimpah dengan banyak sumber mata air. Beberapa mata air tersebut ada yang dipergunakan untuk irigasi pertanian ada pula yang dikelola sebagai objek wisata," ujarnya.

Pj Wali Kota Kediri mengatakan sebagai wilayah urban yang menjadi hub bagi Daerah Mataraman ditambah akan adanya Bandara Internasional Dhoho, potensi pertumbuhan populasi dan aktivitas manusia di Kota Kediri akan semakin besar. Tentu saja hal ini akan berdampak pada kebutuhan air untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, mata air perlu dilindungi dan dirawat.



Pj Wali Kota Kediri Zanariah Tanam Pohon pada Ekspedisi Penyelamatan Mata Air di Sumber Cakarwesi

Hal ini mencakup kebijakan pengelolaan air, pengendalian polusi, dan penanaman vegetasi di sekitar sumber air. Tujuannya jelas untuk menjaga kualitas dan menjaga aliran air yang bersih.

"Terlebih saat ini krisis iklim menjadi ancaman yang serius. Krisis ini menyebabkan anomali cuaca yang ekstrem. Kemarin kita rasakan El-Nino, tapi alhamdulillah inflasi kita juga ketahanan pangan kita tetap terjaga," ungkapnya.

Zanariah menjelaskan saat ini berada di masa perkembangan ekonomi dan teknologi yang begitu cepat. Sayangnya dua hal tersebut sering diiringi oleh kerusakan lingkungan. Deforestasi, polusi udara, dan polusi air yang dapat merugikan alam juga masalah itu sendiri. Dibutuhkan kesadaran untuk menjaga dan memelihara alam. Agar

seimbang antara perkembangan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. Apa yang dilakukan hari ini tidak hanya berkaitan dengan pelestarian alam tetapi membawa manfaat lebih besar. Yakni memelihara peradaban manusia sehingga Sumber Cakarwesi ini akan terus bisa digunakan sebagai irigasi pertanian dan pariwisata.

"Saya sampaikan apresiasi kepada Jawa Pos Radar Kediri dan Tim Ekspedisi karena telah meluangkan waktunya untuk berkegiatan positif merawat vegetasi air. Saya berharap kolaborasi ini terus berlanjut sampai mata air yang ada di Kota dan Kabupaten Kediri terus terpelihara. Saya juga senang dalam kegiatan ini melibatkan gen z dimana dari publikasi mereka kegiatan ini akan diikuti oleh

yang lain," pungkasnya.

Di Kota Kediri sendiri ada 3 sumber yang didatangi Tim Ekspedisi Penyelamatan Mata Air. Ada sumber Jasm di Kelurahan Betet, Sumber Cakarwesi di Kelurahan Tosaren, dan Sumber Ngembak di Kelurahan Gayam. Ekspedisi ini dilakukan dengan melihat kondisi fisik sumber mata air, baku mutu air, ekosistem, hingga penggalan mitologi dan legenda. Kegiatan ini menggandeng akademisi, DLHKP, Perhutani, aktivis lingkungan dan komunitas.

Turut hadir, Direktur Jawa Pos Radar Kediri Kurniawan Muhammad, Kepala KPwBI M. Choirur Rofiq, Perwakilan PT. Gudang Garam Iwan Tri Cahyono, Kepala OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Kediri dan tamu undangan lainnya. (kmf/kan)

Polres Nganjuk Adakan Baksos dan Pengobatan Gratis di Kecamatan Patianrowo

Nganjuk, SMN - Kepolisian Resor (Polres) Nganjuk terus gencarkan program Nusantara Cooling System (NCS) dengan mengadakan bakti sosial dan pengobatan gratis kepada masyarakat Nganjuk.

Kali ini program tersebut diadakan di Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo pada hari Rabu (24/1).

Dipimpin langsung oleh Kapolres Nganjuk AKBP Muhammad, acara baksos dan pengobatan gratis yang diadakan di Balai Desa Ngepung kali ini dihadiri oleh jajaran Forkopimcam Patianrowo, Pempdes dan tidak kurang dari 100 warga Ngepung yang kurang mampu.

Ini semua bertujuan untuk menciptakan suasana damai, aman dan tenteram selama tahapan Pemilu 2024 berlangsung.

Berbagai layanan kesehatan gratis selama acara ini, termasuk pemeriksaan kesehatan umum, pengobatan ringan serta pemberian obat-obatan secara gratis.

Bantuan sosial berupa sembako juga diberikan kepada warga Desa Ngepung yang kurang mampu.



Kapolres Nganjuk AKBP Muhammad menyerahkan bantuan langsung kepada warga Ngepung yang membutuhkan

AKBP Muhammad dalam sambutannya mengatakan jika diperlukan, Polres Nganjuk juga menyediakan fasilitas pemeriksaan dan pengobatan lanjutan kepada warga Ngepung, dengan catatan benar-benar tidak mampu.

"Program NCS yang dilaksanakan bersamaan dengan Baksos dan pengobatan gratis adalah langkah strategis Polres Nganjuk dalam mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam memelihara keamanan dan ketertiban," ujar Kapolres Nganjuk

AKBP Muhammad. Suratini (55) Salah seorang penerima bansos dan pengobatan gratis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Polres Nganjuk dan semua pihak yang telah mengadakan kegiatan ini.

"Bantuan ini sangat berharga bagi kami yang kurang mampu, kami merasa didukung dan dihargai oleh pihak kepolisian serta kami juga merasa aman dan tenang berkat kehadiran air untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, mata air perlu dilindungi dan dirawat.

SUARA MEDIA NASIONAL

KINI ADA VERSI DIGITALNYA!



SCAN! SCAN!



Minimalisir Kesalahan, KPU Kota Probolinggo Gelar Bimbingan Teknis kepada KPPS

Probolinggo, SMN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada 4.683 KPPS se-Kota Probolinggo selama 3 hari (26-28/1).

Ketua KPU Kota Probolinggo, Ahmad Hudri dalam kesempatan tersebut menegaskan, sebanyak 4.683 KPPS yang telah dilantik ini untuk mengikuti Bimtek dari KPU. Diharapkan seluruh anggota KPPS dapat memahami secara teknis pemungutan suara pada Pemilu 2024 yang akan diselenggarakan Tanggal 14 Februari mendatang.

"Tujuannya diselenggarakan Bimtek agar KPPS menguasai sepenuhnya mekanisme teknis pemungutan dan perhitungan suara, sehingga dapat meminimalisir tingkat kesalahan," katanya.

Achmad Hudri juga berharap, saat kegiatan Bimtek tersebut agar semua anggota KPPS mengikuti secara seksama agar dapat menguasai sepenuhnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Pelaksanaan Bimtek hari pertama di GOR Mastrip Kota Probolinggo.

"Kita ingin meminimalisir segala bentuk kesalahan dan sesempurna mungkin melaksanakan pemilu, dan harapannya KPPS dapat bekerja sama dengan badan adhoc yang lain untuk sosialisasi kepada masyarakat agar menggunakan hak pilihnya," harapnya.

Di kesempatan terpisah, Ahmad Hudri juga menjelaskan, ada perbedaan sarana antara Pemilu 2019 dan Pemilu 2024. Sarana tersebut untuk memban-

tu mengurangi kesalahan. Sara yang dimaksud adalah printer, laptop, mesin scanner, dan beberapa alat lainnya.

Dari 4.683 KPPS tersebut, setidaknya akan mengisi 699 TPS yang tersebar di 29 Kelurahan di 5 Kecamatan Kota Probolinggo.

Hudri juga mengatakan sampai saat ini belum ada yang mengundurkan diri, tetapi kecil kemungkinan melakukannya.

"Sudah diberi waktu jika ada

yang hendak mengundurkan diri sebelum pelantikan. Walaupun ke depan bisa berubah tergantung situasi dan kondisi tertentu," kata Hudri.

Ketua KPU Jawa Timur Choirul Anam sebelum membuka kegiatan tersebut mengatakan, dengan Bimtek ini diharapkan anggota KPPS dapat mengikuti semuanya.

"Saya berharap dengan Bimtek akan mendapatkan pengetahuan dan keahlian terkait pelaksanaan pemilu 2024," katanya.

Di kesempatan terpisah, Choirul Anam menegaskan, ribuan KPPS yang dikumpulkan untuk mengikuti Bimtek ini adalah bagian dari instruksi KPU RI.

"Ini merupakan perbedaan dari Pemilu 2019, di mana hanya ketua yang mendapat Bimtek. Kali ini dalam hal kesiapan fisik dan SDM, sebelumnya, pada saat pendaftaran, wajib menyertakan surat kesehatan, dengan memprioritaskan usia di bawah 55 tahun," tegasnya. (ed)

Sukseskan Pemilu 2024, Pemkot Probolinggo Ajak Satpol PP Tingkatkan Peran Satlinmas

Probolinggo, SMN - Wali kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin dalam Upaya mensukseskan Pemilu Tahun 2024, mengajak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo untuk menaungi dan berperan aktif dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024, (25/1).

Kepala Satpol PP Pujo Agung Satrio dalam laporannya, sosialisasi ini digelar untuk meningkatkan peran Satlinmas dalam mendukung trantibum di Kota Probolinggo, khususnya dalam menghadapi pemilu.

"Oleh karena itu pada pagi hari ini kami berupaya untuk meningkatkan peran dari Satlinmas guna mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024 Kota Probolinggo," terang Pujo.

Masih di agenda yang sama, juga dilakukan penyematan atribut linmas secara simbolis oleh Wali Kota Hadi Zainal Abidin kepada perwakilan Satlinmas dari masing-masing kecamatan. Penyematan ini juga menandai penggunaan seragam dengan warna baru bagi Satlinmas Kota Probolinggo, mengi-



Walikota Hadi Zainal Abidin dalam kegiatan sosialisasi peran Satlinmas.

kuti ketentuan dari Kementerian Dalam Negeri.

Hadi, mengatakan bahwa kesuksesan gelaran Pemilu 2024 merupakan tanggung jawab bersama. Untuk itu dirinya meminta komitmen seluruh anggota Satlinmas untuk menjaga pelaksanaanannya.

"Tentunya kepercayaan pemerintah terhadap anda semua yang terpilih betul-betul menjadi harapan untuk bisa menjaga terlaksananya pemilu ini lancar, damai, tertib, karena ini menjadi tanggung jawab kita semuanya," pesannya.

Hadi juga mengharapkan per-

an Satlinmas kedepan berkembang. Yakni, dengan turut menjaga ketertarikan dan ketertiban di masing-masing kelurahannya.

"Bukan hanya sekedar pada saat adanya pemilu saja linmas ini menjadi ujung tombak kesuksesan dalam penyelenggaraan pemilu saja, tapi kedepannya harus kita kembangkan untuk menjaga keamanan, ketertiban di lingkungan masing-masing yaitu di kelurahan, dan Bagaimana kelurahan itu menjadi aman dan tertib semacam siskamling, akan kita terbitkan kembali dan melibatkan linmas semuanya," tambahnya. (ed)

Tingkatkan Perekonomian, Pemkot Probolinggo Tanda Tangan Kerjasama dengan PT Amco Jaya Tri Tunggal Pratama

Probolinggo, SMN - Pemerintah Kota Probolinggo dan PT Amco Jaya Tri Tunggal Pratama menandatangani kesepakatan bersama di Rumah Dinas Wali Kota, Rabu (24/1).

Kepala (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan) DKUP, Fitriawati menjelaskan tentang Kerja Sama Pemanfaatan BMD (KSP). Pihaknya berpedoman pada Permendagri No 19 Tahun 2016 dimana tahapan yang harus dilakukan dimulai pembentukan Tim KSP, hingga tender terbuka yang dimenangkan oleh PT Amco Jaya Tri Tunggal Pratama.

Penandatanganan kerjasama diawali oleh Sekretaris Daerah Kota Ninik Ira Wibawati dan Direktur PT Amco Jaya Tri Tunggal Pratama, Hartono Tanu Wiharja. Dengan para saksi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Inspektur, Kepala BP-PKAD, Kepala DKUP, Kepala Bappeda Litbang, Kepala Dinas PUPR dan terakhir ditandatangani oleh Wali Kota Hadi Zainal Abidin.



Walikota Hadi Zainal Abidin saat Tanda tangan kerjasama.

Dalam sambutannya, Hadi Zainal Abidin mengapresiasi investor tersebut dalam upaya menggerakkan perekonomian di Kota Probolinggo dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Termasuk membuka lapangan kerja baru bagi warga kota.

"Probolinggo Plaza sudah lama terbengkalai. Setelah statusnya kembali sebagai aset pemkot, maka terbuka bagi investor dalam memanfaatkan

BMD itu, yang akhirnya dimenangkan oleh PT Amco Jaya Tri Tunggal Pratama. Dan baru saja proses penandatanganan kerja sama sudah dilaksanakan," urainya.

Hadi Zainal Abidin juga menambahkan, kerja sama pemkot dengan investor sebelumnya, PT Avilla Prima Intra Makmur sudah berakhir. Untuk itu, PT Amco Jaya Tri Tunggal Pratama tidak perlu khawatir dengan persoalan legalitas ker-

jasama tersebut, karena sesuai prosedur/aturan yang berlaku.

"Jika mengalami gangguan atau permasalahan, silakan bisa koordinasi dengan pemerintah kota. Untuk keamanan bisa langsung berkomunikasi dengan kapolres atau dandim, terutama saat merealisasikan rencana pekerjaannya. Segera lakukan action plan pasca ditandatangani kerja sama ini," tegasnya.

Direktur PT Amco Jaya Tri Tunggal Pratama Hartono Tanu Wiharja mengungkapkan alasan memilih Kota Probolinggo untuk berinvestasi.

"Disini itu nyaman dan kondusif, warga juga suka berbelanja di daerahnya sendiri. Kita sudah membuat DED-nya, bakal ada gedung pertemuan, rooftop, menggandeng para UKM kota juga nantinya. Termasuk jika ada yang membutuhkan permodalan, kita akan berkoordinasi dengan DKUP. Saya optimis pergerakan ekonomi di kota ini terus berkembang," pungkasnya. (ed)

Maraknya Sapi Eks Impor di Lumajang, Pedagang Mengalami Penurunan Pendapatan

Lumajang, SMN - Pj Bupati Lumajang, Indah Wahyuni merespon keluhan perwakilan Asosiasi Pedagang Sapi Lumajang, terkait beredarnya Sapi eks Impor di Kabupaten Lumajang.

Diketahui, sejak tiga bulan terakhir, para pedagang mengalami penurunan pendapatan akibat maraknya Sapi eks impor. Para konsumen lebih banyak memilih sapi tersebut karena memiliki harga yang lebih murah dari Sapi lokal.

Dalam dialog yang berlangsung di Gedung PKK Kabupaten Lumajang, Kamis (25/1) lalu, Indah Wahyuni menegaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur tidak pernah mengeluarkan kebijakan jijn Sapi impor ke daerah. Dirinya pun sudah berkoordinasi dengan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur.

"Saya sudah berkoordinasi dengan Kadis Pertanian Kabupaten Lumajang maupun dari Provinsi Jatim, kami tidak pernah mengeluarkan persetujuan sapi impor," ungkapnya, saat dimintai keterangan sejumlah wartawan waktu itu.

Dari data yang diperoleh awak media, Jawa Timur, memiliki jumlah populasi sapi potong terbesar se-Indonesia, dengan jumlah 27 persen dari total populasi nasional. Hal itu tentu tidak mungkin ada kebijakan impor sapi untuk wilayah Jawa Timur.

Dari hasil pemantauan di lapangan, Pj Bupati Lumajang menyebut, kalau Sapi eks impor tersebut berasal dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Masuknya Sapi eks impor tersebut tidak resmi lantaran tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

"Kami tidak memberikan kebijakan jijn sapi impor masuk Lumajang, yang masuk ke Lumajang adalah eks sapi impor dari Kabupaten Bandung, dan ini tidak diperkenankan karena masuknya ke Lumajang tidak sesuai dengan aturan, alias ilegal," lanjutnya.

Jarit, Novita Supristiwati menyampaikan apresiasi atas inovasi yang dilakukan oleh Dispendukcapil Kabupaten Lumajang. Ia juga berterima kasih kepada Tim Desa Digital serta Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang, yang telah memberikan dukungan.

"Program ini didukung oleh diskominfo melalui optimalisasi web desa dan fasilitas sarana jaringan internet untuk mempercepat proses pelayanan," imbuhnya.

Dengan adanya pelayanan administrasi kependudukan yang terintegrasi di tingkat desa, masih kata Novita, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah



Pedagang sapi berdialog dengan pj bupati

gal," lanjutnya. Selanjutnya, Indah Wahyuni meminta jajaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Lumajang melakukan pemantauan dan membuat Surat Edaran (SE) yang berisi larangan masuknya sapi eks impor ke wilayah Kabupaten Lumajang.

"Pemenuhan dokumen sapi yang akan masuk wilayah Kabupaten Lumajang dan larangan untuk melakukan pemotongan hewan di luar Rumah Potong Hewan (RPH) resmi di Kabupaten Lumajang," tegasnya.

Kepala BKD Provinsi Jawa Timur ini juga menjelaskan, jika keberadaan eks Sapi impor merupakan aktivitas ilegal karena tidak mendapat izin dari Pemkab Lumajang dan Pemprov Jawa Timur. Dirinya kembali menegaskan larangan terhadap peredaran eks sapi impor di wilayah Kabupaten Lumajang.

Menurutnya, eks Sapi impor ternyata berdampak pada stabilitas perdagangan Sapi di Kabupaten Lumajang. Oleh karena itu, Pj Bupati berkomitmen untuk merumuskan solusi terhadap permasalahan ini dan membenahi tata niaga yang saat ini dihadapi oleh pedagang Sapi, peda-

gang daging Sapi, dan jagal. "Ini adalah masalah tata niaga. Saya tidak mengijinkan adanya sapi eks impor masuk ke Lumajang. Saya minta Perangkat Daerah untuk turun langsung ke lapangan, melihat kondisi pembeli dari luar Lumajang ini, dan nanti kita tertibkan bersama-sama," ungkapnya.

Selain itu, Bunda Yuyun, panggilan akrabnya, menekankan agar pedagang daging Sapi atau jagal tidak melakukan penyembelihan di luar RPH yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga standar penyembelihan dan meningkatkan kontrol terhadap sapi yang akan disembelih.

"Kalau melakukan pemotongan sapi, saya minta agar dilakukan di RPH yang sudah ditentukan oleh Pemkab Lumajang. Meskipun pihak swasta diperbolehkan membuka rumah jagal, namun harus melalui prosedur dan aturan yang berlaku," terang dia.

Dengan adanya pertemuan tersebut, diharapkan akan tercapai solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak terkait dalam rangka menjaga kestabilan perdagangan sapi di Kabupaten Lumajang. (Tik)

Di Balik Kesan Angker Pantai Dampar Lumajang; Menyimpan Ombak Kualitas Dunia

Lumajang, SMN - Muhammad Khoiri, seorang peselancar berbakat asal Desa Tempeh Lor Kabupaten Lumajang, Jawa Timur memuji kualitas ombak di pantai selatan, khususnya di Pantai Dampar.

Menurutnya, ombak di Pantai Dampar memiliki kualitas yang sejajar dengan event World Surfing League (WSL).

"Pantai selatan punya destinasi yang istimewa, bagus ombaknya untuk selancar, beberapa spot punya ombak yang benar-benar keren, salah satu spot kelasnya sudah termasuk WSL, di pantai Dampar, untuk event bagus banget," ujar nya saat dimintai keterangan di kediamannya, jumat, (26/1) lalu.

Meskipun begitu, Khoiri memberikan peringatan, bahwa ombak di Pantai Dampar tidak



Ombak Pantai Dampar

cocok untuk pemula. Ia merekomendasikan pantai-pantai lain seperti Pantai Mbah Draji dan Pantai Meleman untuk mereka yang baru memulai

"Pantai Dampar ombaknya besar, arusnya kuat, tetapi bukan untuk pemula, untuk pemula sebaiknya di Pantai Mbah Draji

dan Pantai Meleman, kalau pantai Bambang dan Pecak tidak rekomen karena arusnya kenceng banget," katanya.

Khoiri, yang kini aktif bersama Komunitas Lumajang Surf, sedang menjajaki beberapa pantai lain di sepanjang pantai selatan Lumajang. Tujuann-

ya adalah memastikan kualitas ombak dan keamanan bagi para peselancar yang ingin menjajal ombak di daerah tersebut.

Mengenai citra pantai selatan yang dianggap angker dan memiliki cerita tentang banyaknya korban jiwa, Khoiri menegaskan bahwa hal itu disebabkan oleh kurangnya edukasi kepada masyarakat. Ia menekankan perlunya pemahaman akan keamanan dan aturan sebelum berenang di pantai.

"Image pantai selatan itu angker banyak menelan korban, kita bisa menepis itu, karena mereka tidak tahu arus bawah seperti apa, bahayanya dimana, safetynya bagaimana, kebanyakan korban renang memakai jeans tentu berat untuk berenang, dan renang di kolam dan laut itu beda," tutupnya. (Tik)

Kampanye Terbuka Partai Demokrat di Lumajang Disertai Hujan Deras

Lumajang, SMN - Pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur kini semakin mudah diakses oleh masyarakat di tingkat desa. Melalui e-paket (Pelayanan Kependudukan Terintegrasi), dokumen kartu keluarga, kelahiran, dan kematian, serta surat pindah dapat diproses dengan cepat dan efisien.

Saat dimintai keterangan di sela kegiatannya, Jumat (12/1), Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Dispendukcapil, Hariyanto menerangkan, bahwa pelayanan tersebut saat ini baru tersedia di 90 desa yang telah terintegrasi dengan Dispendukcapil Kabupaten Lumajang. Salah satu desa yang telah mengimplementasikan sistem ini adalah Desa Jarit.

"Desa Jarit sudah dapat memproses dengan dukungan diskominfo layanan yang cepat. Uji coba di Desa Jarit menunjukkan, bahwa masyarakat dapat

menyelesaikan surat pindah dalam waktu 30 menit," jelasnya.

Hariyanto juga menerangkan, untuk meningkatkan cakupan pelayanan, Pemerintah Kabupaten Lumajang memiliki target. Pada tahun 2024, Pemkab menargetkan 60 desa dapat memberikan layanan e-paket. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan administrasi kependudukan.

"Target Tahun 2024 adalah 60 desa harus dapat memberikan layanan e-paket, sehingga pelayanan menjadi lebih maksimal," terangnya.

Program e-paket juga turut berkolaborasi dengan Program Smart Village Kementerian Desa PDTIT di 20 desa yang telah ditetapkan sebagai lokasi smart village. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat menciptakan desa-desa pintar yang mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Sementara itu, Kepala Desa



Acara kampanye Partai Demokrat di Stadion Semeru

mengurus dokumen kependudukan tanpa harus melakukan perjalanan jauh ke kantor pusat. Pemerintah Kabupaten Lumajang terus berkomitmen

untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi secara efektif. (Tik)

Jaga Kinerja Pelayanan, PDAM Kota Madiun Gelar Pembinaan Pegawai

Madiun, SMN - Kedisiplinan pegawai menjadi faktor penting untuk menjaga kinerja dan pelayanan dalam sebuah perusahaan. Untuk itu, PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun Suyoto Harjo Wiyono, senantiasa menggelar pelatihan dan pembinaan untuk melatih kedisiplinan pegawai secara berkala.

Salah satunya dilakukan di markas Batalyon Infanteri Para Raider 501/Bajra Yudha yang dimulai 25-29 Januari 2024, mendatang.

Di markas TNI ini, pegawai mengikuti pelatihan bersama anggota anggota Para Raider 501 untuk meningkatkan semangat dan menjaga etos kerja yang positif.



Wali Kota Madiun Maldi bersama Direktur PDAM Tirta Taman Sari, Suyoto Harjo Wiyono memberikan pembinaan pegawai bersama batalion para raider 501 Bajra Yudha

Walikota Madiun, Maldi, dalam pembukaan pembinaan pegawai PDAM ini juga turut memberikan arahan. Ia mengimbau, seluruh peserta untuk dapat menyerap materi pelatihan dengan optimal.

"PDAM itu perusahaan yang melayani masyarakat. Maka, pelayanan harus dijaga dan ditingkatkan," pinta Maldi. Walikota kembali berharap,

seluruh pegawai dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik serta dapat bekerja dalam tim sehingga senantiasa solid.

"Dengan begitu, pelayanan PDAM akan semakin meningkat," tandasnya.

Sementara itu, Dirut PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun, Suyoto Harjo Wiyono, mengatakan, pelatihan akan berlangsung selama lima hari. Yakni, mulai 25 hingga 29 Januari 2024. Selama masa pelatihan, peserta akan menginap di camp Yon Raider 501.

"Semoga pelatihan berjalan lancar dan semua peserta bisa mengikuti dengan optimal," harap Suyoto. (SY)

Bakesbangpol dan Forkopimda Kabupaten Madiun Gelar Rakor Deteksi Dini Potensi Konflik Pemilu 2024



Pj Bupati Madiun Tontro Pahlawanto bersama Forkopimda Kabupaten Madiun dan Kepala Bakesbangpol Kabupaten Madiun Mashudi dalam acara Rakor 3 pilar jelang pemilu 2024 di Pendopo Ronggo Jumeno Caruban Kabupaten Madiun

Madiun, SMN - Untuk mengetahui sejauh mana kesiapan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024, pemerintah Kabupaten Madiun melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Madiun menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda dan tiga pilar di desa dan kelurahan se-Kabupaten Madiun yang bertempat di Pendopo Ronggo Jumeno Caruban Kabupaten Madiun, Jumat (19/1).

Menurut Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Madiun Mashudi, tujuan Rakor ini adalah untuk mendapatkan masukan tentang kesiapan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. Serta mendeteksi dan pencegahan dini baik penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, keamanan pemilu maupun pemerintah Kabupaten Madiun.

"Selain itu menurutnya un-

tuk mengetahui permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat segera di carikan solusi dan penyelesaiannya juga untuk meningkatkan sinergitas antara seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pemilu dan untuk menyatukan persepsi dan langkah dalam mengantisipasi kerawanan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024" ujar Mashudi, Kepala Bakesbangpol Kabupaten Madiun.

Dalam kesempatan ini, Pj Bupati Madiun Tontro Pahlawanto berharap di setiap TPS (Tempat Pemungutan Suara) untuk menyiapkan door prize agar dapat menarik minat para pemilih agar semangat datang ke TPS. Door prize tersebut tidak harus mahal, misalnya seperti sembako dan sebagainya.

"Door prize tersebut yang disiapkan tidak semua pemilih dapat, karena nantinya akan diundi setelah pencoblosan

selesai, sebelum penghitungan suara di mulai. Door prize yang diberikan tidak usah mahal misalnya beras, gula, minyak dan sebagainya. Hal ini hanya untuk merangsang agar pemilih mau datang di TPS untuk menggunakan hak suaranya" jelas Tontro Pahlawanto.

Selain itu, Tontro meminta kepada Kepala Pimpinan OPD, BUMD, dan BUMN tidak memberikan cuti kepada stafnya (ASN, karyawan BUMD, BUMN, swasta) pada tanggal 12 dan 13 februari 2024. Begitu pula kepada para Camat, Kepala Desa dan Kepala Kelurahan agar tidak berpergian keluar daerah (keluar kota) mulai tanggal 10 februari 2024 karena di tanggal itu mulai ada pengiriman logistik pemilu dari KPU.

"Upaya ini kita lakukan agar tidak terjadi konflik saat pelaksanaan pemilu. Selain itu juga partisipasi masyarakat agar bisa menggunakan hak suaranya secara maksimal dan bisa memenuhi target yang telah di tentukan bahkan kalau bisa lebih" pinta Tontro Pahlawanto.

Di kesempatan yang sama baik Kapolres dan Kapolresta Madiun, Dandim 0803 Madiun dan Kasi Intel Kejari Madiun juga memberikan pengarahan yang sama, yang cukup jelas dan gamblang dengan harapan seluruh peserta Rakor bisa paham akan tugas dan tanggung jawab masing masing demi kelancaran pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 di Kabupaten Madiun. (SY)

Pj Bupati Madiun bersama Masyarakat Gelar Aksi Peduli Lingkungan Resik Kota Caruban

Madiun, SMN - Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Madiun menggelar aksi peduli lingkungan dengan tema "Resik Resik Bareng Pj Bupati dan masyarakat" di wilayah Kota Caruban, Jumat (19/01).

Kegiatan aksi peduli lingkungan tersebut di gelar dalam rangka menyongsong kesiapan evaluasi Adipura 2023 dan hari peduli sampah bulan Februari 2024 mendatang. Kegiatan aksi peduli lingkungan ini diikuti Pj Bupati Madiun Tontro Pahlawanto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Madiun Zahrowi jajaran OPD Kabupaten Madiun masyarakat sekitar Caruban dan pelajar yang berada di Kota Caruban.

"Kita harus terus menerus menyemangati tentang kepedulian terhadap lingkungan ini, untuk membudidayakan dan membiasakan masyarakat caruban pada utamanya untuk



Pj Bupati Madiun Tontro Pahlawanto di dampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Madiun Zahrowi dan jajaran OPD meninjau lokasi yang di bersihkan di wilayah Kota Caruban.

peduli pada lingkungan" kata Tontro Pahlawanto.

Selain itu, menurutnya, keindahan Kota Caruban harus terus dibenahi, dipoles, diperindah dan dipercantik. Dengan begitu nantinya akan banyak masyarakat yang berbondong-bondong menuju Kabupaten Madiun, sehingga investasi

dan perekonomian masyarakat semakin menggeliat dan membaik.

"Caruban yang sudah ditetapkan menjadi Ibu Kota Kabupaten Madiun, maka keindahan dan kebersihannya harus tetap terjaga, agar menjadi daya tarik bagi masyarakat luar, sehingga ekonomi tetap terus bergerak

lebih baik," tambahnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Madiun Zahrowi menyampaikannya bahwa setiap yang datang di Kabupaten Madiun akan memulai dari Kota Caruban. Oleh sebab itu, ia mengatakan seluruh masyarakat untuk memiliki budaya peduli lingkungan, utamanya di wilayah Kota Caruban yang telah di tetapkan sebagai Ibu Kota Kabupaten Madiun sejak tahun 2010 lalu.

"Kegiatan aksi peduli lingkungan ini tidak hanya sebagai moment saja akan tetapi moment ini bisa sebagai motor penggerak di masyarakat Madiun untuk melanjutkan aksi peduli lingkungan secara berkelanjutan dan tidak hanya di Kota Caruban saja, melainkan seluruh Kabupaten Madiun bisa mengikuti aksi serupa ini, nantinya Kabupaten Madiun menjadi lebih baik, indah dan cantik" jelasnya (SY)

Wali Kota Probolinggo Resmikan Pemeliharaan Jalan Siaman dan Jalan Cut Nyak Dien

Probolinggo, SMN - Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin didampingi Dandim 0820/Letkol Arm Heri Budiaso, Kapolres Probolinggo Kota AKBP Wadi Sa'bani dan sejumlah kepala perangkat daerah meresmikan pemeliharaan Jalan Siaman dan Jalan Cut Nyak Dien di Kecamatan Kanigaran, Jum'at (26/1).

Walikota Hadi mengatakan dengan adanya peresmian jalan tersebut menandakan bukti nyata atensi Pemerintah Kota Probolinggo dalam percepatan infrastruktur untuk masyarakat. Sekaligus komitmen untuk terus berbenah dan melakukan hal terbaik demi kemashlahatan umat juga atas segala permasalahan-permasalahan yang ada.

"Alhamdulillah, ini ada suatu komitmen dari pemerintah untuk terus berbenah dan melakukan yang terbaik, utamanya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat," katanya.

Hadi juga menjelaskan, apa saja tantangan dan kendala yang dihadapi dalam menjalankan amanah rakyat sejak tahun 2019 lalu itu. Diantaranya melanjutkan pembangunan yang telah dikerjakan sebelumnya serta pandemi Covid-19 yang ber-



Wali kota Hadi Zainal Abidin didampingi Forkopimda Resmikan Jalan.

dampak pada refocusing anggaran ke sektor sosial, kesehatan dan ekonomi.

"Dalam satu sektor saja ada harapan-harapan yang harus dipercepat penyelesaiannya. Belum lagi janji politik yang juga harus saya penuhi dan Alhamdulillah tuntas bertepatan dengan selesainya masa kepemimpinan saya. Ini juga tak terlepas dari kerjasama dan kolaborasi bersama Bu Sekda dan segenap jajaran," jelasnya.

Hadi juga mengajak warga yang memiliki kerabat dan berminat membuka usaha, dalam ikut serta berpartisipasi dalam pemanfaatan lahan aset Pemkot.

"Saya mengajak semuanya, mungkin ada saudara atau kerabat yang punya usaha di luar,

ayok, berinvestasilah di Kota Probolinggo dan pekerjaan orang Kota Probolinggo," ajaknya.

Walikota berharap kepada para pengelola dan pengusaha, utamanya yang ada di sepanjang kawasan Siaman dan Cut Nyak Dien, Jalan Pahlawan dan Jalan Panglima Sudirman, dapat mengembangkan potensi-potensi usaha yang lainnya.

Kapolres Probolinggo Kota AKBP Wadi Sa'bani menyampaikan apresiasi atas diresmikannya pemeliharaan jalan di dua kawasan tersebut. Tak hanya sekedar memperbaiki jalan yang rusak, saluran drainase pada dua ruas jalan ini juga dinormalisasi. Dimana tepi sisi barat Jalan Siaman dan tepi sisi

timur Jalan Cut Nyak Dien juga dibongkar dan diganti.

"Hari ini kita menyaksikan, peresmian pembangunan jalan yang telah dilaksanakan, dari sisi infrastruktur baik itu jalan, gorong-gorong, sampai trotoar dan lain sebagainya. Tentunya ini merupakan titik baik, representatif negara untuk hadir di setiap permasalahan warganya, dan setelah ini adalah kewajiban kita untuk saling menjaga, ya" pintanya.

Kapolres Wadi juga menekankan bahwa jika dalam pelaksanaannya nanti, masyarakat membutuhkan bantuan terkait keamanan dan kenyamanan, Kapolresta mempersiapkan untuk melapor melalui sistem keamanan terpadu bernama Meteor.

"Telpon saja Meteor 112, dua puluh empat jam. Ini bagian dari quick respon bagi warga. Karena keamanan ini adalah hal vital terkait dengan pendukung pembangunan yang ada di Kota Probolinggo. Ada polisi RW-nya juga, yang disiapkan untuk mapping dan menyelesaikan segala permasalahan yang ada di lingkungan sekitar," tandasnya. (ed)

Kampanye Ganjar di Ngawi, Kunjungi Museum Radjiman Hingga Tinjau Pabrik Sepatu

Ngawi, SMN - Kampanye calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, di Kabupaten Ngawi menjadi awal gerilyanya melakukan kampanye terbuka di tahun 2024 di wilayah Jawa Timur, Kamis (18/1).

Ganjar mengunjungi Museum Roemah Voorzitter Van Het BPUPKI-Dr KRT Radjiman Widoyodiningrat, Widodaren. Di tempat ini, Ganjar berkeliling melihat sejumlah karya dan memorabilia Radjiman Widoyodiningrat.

Ganjar mengaku kagum dengan Ketua BUPKI itu dan menilai Dr. Radjiman sebagai orang yang sangat peduli pada budaya dan masyarakat, serta memegang teguh nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

"Bahkan beliau menulis bahwa papun kondisi Indonesia pada saat itu dimana banyak pengaruh budaya Eropa masuk, kita harus selalu berpegang pada akar budaya dan itu ditunjukkan," kata Ganjar.

Ganjar juga menilai Dr Radjiman adalah figur teladan bagi anak muda dalam meraih cita-cita. Radjiman juga menunjukkan hal itu dengan tekadnya menjadi dokter meski ayahnya seorang koprak.



Kampanye Ganjar Pranowo di Kabupaten Ngawi, Kamis (18/1/2024).

"Dan dia tulisan di dinding itu siapapun bisa menjadi seorang dokter jadi artinya siapapun bisa menjadi apapun. Ini semangat untuk anak-anak muda agar tidak pernah menyerah," ungkap Ganjar.

Kesempatan ini, Ganjar diberikan buku sejarah Radjiman Widoyodiningrat. Namun, dia menyayangkan buku itu hanya sebuah fotocopy.

"Sayang ya, kalau ini bisa kita cetak banyak di sini maka orang-orang yang datang ke sini bisa membeli buku ini, atau ditiketkannya ke sini dan buku ini bisa jadi give away yang menarik," kata Ganjar.

Ganjar Pranowo pada hari itu juga berkunjung ke pabrik sepatu di Desa Karangasri Ke-

camatan Ngawi. Pabrik ini merupakan mitra produksi untuk sepatu yang dikirim ke luar negeri (ekspor).

"Kita harus bangga bahwa produk sepatu terkenal dari luar negeri itu dikerjakan di Ngawi, Jawa Timur. Keberadaan pabrik ini juga menyerap tenaga kerja dan membantu perekonomian masyarakat," ungkap capres yang berpasangan dengan cawares Mahfud MD ini.

Kampanye Ganjar Pranowo di Kabupaten Ngawi kemudian dilanjutkan dengan pertemuan bersama kader, relawan dan partai pendukung sebagai konsolidasi memenangkan pasangan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024. (ari)



Jaga Kondusifitas Jelang Pemilu, Polres Ngawi Amankan 11 Tersangka Pengeroyokan

Geneng, YH (18) Pitu, dan empat orang lainnya masih di bawah umur.

Barang bukti diantaranya rangka sepeda motor Verza AE 6064 LA dan rangka sepeda motor Honda Revo Nopol AD 2345 YA yang dibakar. Enam buah batu, sebuah handpone, sebuah ranting kayu dan kayu balok serta sebuah pet helm cargloss warna hitam.

Kapolres dan Komandan Ko-

dim 0805 Ngawi juga kompak memberikan imbauan agar jangan terpancing provokasi yang beredar yang belum tentu kebenarannya.

"Kami juga mengajak untuk bersama-sama menjaga agar pelaksanaan Pemilu 2024 nanti berjalan lancar dan damai. Kami mengimbau jangan mudah terpancing provokasi yang dapat mengganggu keamanan di Ngawi," kata Dandim



KERJASAMA & IKLAN:

0823 3199 9509

Jaga Kondusifitas Jelang Pemilu, Polres Ngawi Amankan 11 Tersangka Pengeroyokan

Ngawi, SMN - Polres Ngawi bergerak cepat menanggapi warga Sine yang melaporkan bahwa kendaraan roda duanya dirusak dan dibakar.

Tidak sampai 24 (dua puluh empat) jam, Resmob Polres Ngawi bersama Polsek Sine dibawah kendali Kasat Reskrim Polres Ngawi AKP Joshua Peter Krisnawan, berhasil mengamankan 11 tersangka berikut

barang buktinya.

"Alhamdulillah, tidak sampai 24 jam, Polres Ngawi telah berhasil mengamankan pelaku pembakaran dua sepeda motor sebanyak 11 orang, empat diantaranya masih di bawah umur," jelas Kapolres Ngawi AKBP Argowiyono, saat menggelar konferensi pers (18/1).

Pelapor yang juga korban adalah Yusuf Panji N (18) war-

gus Dusun/Desa Wonosari Kec. Sine Kab. Ngawi dan Suyatno (37) warga Dsn Kesumorejo Ds. Pocol Kec. Sine Kab. Ngawi.

Peristiwa tersebut terjadi masuk di Jl. Raya Wonosari-Sine RT. 02 RW. 03 Desa Pocol Kecamatan Sine, pada hari Selasa (16/1), sekira pukul 01.30 WIB.

"Pelaku secara bersama-sama melakukan perusakan dan pembakaran sepeda motor dan

kini sudah diamankan di Polres Ngawi berikut barang buktinya," lanjut Argowiyono didampingi Dandim 0805 Ngawi, Letkol Arm Didik Kurniawan.

Identitas ke 7 (tujuh) pelaku yang berhasil diamankan di Polres Ngawi adalah MR (22) Ds. Kedunggal, IZ (20) Ds. Widodaren, YYS (18) Kedunggal, DDAP (21) Sragen, AAFN (18) Gerih, SAS (21)

Tindak Lanjut Maklumat Kapolda, Polres Rembang Adakan Sosialisasi Larangan Knalpot Brong

Rembang, SMN - Dalam rangka menindak lanjuti Maklumat Kapolda Jawa Tengah dan perintah Kapolres Rembang terkait maraknya kendaraan bermotor dengan menggunakan knalpot Brong, jajaran Polsek Pamotan melakukan sosialisasi ke sejumlah sekolah SMK - SMA di Pamotan Kabupaten Rembang, Senin (15/1).

Kapolres Rembang AKBP Suryadi melalui Kapolsek Pamotan AKP M. Sulhan Mulyadi menghimbau agar para pengendara motor tidak menggunakan knalpot brong saat berkendara di jalan raya. Operasi khusus knalpot brong dimulai 11 Januari 2024 hingga 25 Januari 2024.

Sosialisasi terkait himbauan tersebut, jajaran Polsek Pamotan bersama sejumlah anggota mendampingi sekolah SMK Muhammadiyah Pamotan, SMK NU Pamotan, SMK Arrohmadiyah Pamotan dan SMA N 1 Pamotan.

Kapolsek menghimbau, bahwa tertib berlalu lintas di Sekolah SMK - SMA di wilayah Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang itu untuk ditaati oleh semua pengguna kendaraan bermotor.

Dalam memberikan arahan tentang pelanggaran penggunaan knalpot brong dengan ketentuan dari berkendara yang benar. Di hadapan para pelajar di dampingi guru dan kepala sekolah tersebut.



Kapolsek bersama siswa siswi sma dan smk di pamotan saat memberikan sosialisasi penggunaan knalpot brong

Kapolsek Pamotan menambatkan, pihaknya mengajak guru dan murid untuk bersama menciptakan jalan raya yang aman dan nyaman.

"Pada kegiatan sosialisasi hari ini menghimbau kepada manajemen sekolah serta pelajar untuk mengganti knalpot brong menjadi knalpot yang standar sehingga pelajar bisa mempraktekkan tertib berlalu lintas," kata Kapolsek.

Dalam hal ini, Ketertiban penggunaan kelengkapan kendaraan, diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 285 ayat (1) Jo.

Pasal 106 ayat (3) "Setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan,

dan knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu

Lebih lanjut, menurut dia bahwa sosialisasi tertib lalu lintas terkait knalpot brong akan terus berlanjut ke sekolah - sekolah lain di wilayah Kecamatan Pamotan, baik SMA maupun SMK.

"Untuk saat ini sasaran sosialisasi kepada pelajar berdasarkan pengamatan pihak kepolisian dalam kegiatan patroli balap liar disinyalir bahwasannya anak dibawah umur menggunakan kendaraan dengan knalpot tidak sesuai standart," tandas Sulhan.

Selain sosialisasi ke sekolah - sekolah, Polsek Pamotan juga akan memberikan sosialisasi ke komunitas dan organisasi yang berpotensi menggunakan knal-

pot brong.

Kapolsek berharap dengan safari sosialisasi tertib lalu lintas pelanggaran knalpot brong, bisa mengurangi dan menetralkan dari kebisingan knalpot brong sehingga pengendara bisa nyaman, aman, tertib dan saling menghargai sesama pengendara.

Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Pamotan, Mokhammad Mujib menyambut baik dan mendukung sosialisasi tertib lalu lintas sekaligus sebagai penguatan aturan yang sudah dilaksanakan oleh sekolah terkait kendaraan yang tidak sesuai standard khususnya knalpot brong.

"Sekolah kami juga rutin melaksanakan pengecekan kendaraan, dan aturan kami juga jelas melarang adanya knalpot brong. Dengan adanya jajaran Polsek Pamotan hari ini sebagai penguat untuk anak anak memperhatikan keselamatan berlalu lintas untuk diri sendiri maupun pengendara lain," tutur Mokhammad Mujib.

Kegiatan sosialisasi dari jajaran Polsek Pamotan diakhiri dengan menempel surat maklumat dari Kapolda Jawa Tengah, himbauan pelanggaran knalpot brong bersama Kapolsek Pamotan, Ke pihak sekolah SMK - SMA yang berada di wilayah Kecamatan Pamotan kabupaten Rembang Jawa Tengah. (OR)

Tingkatkan Kemampuan Manajemen Media Pada Masa Pemilu, Bidhumas Polda Jateng Gelar Pelatihan

Magelang, SMN - Polda Jateng melalui Bidang Humas memperkuat pengelolaan informasi dan manajemen media di masa Pemilu dengan menggelar pelatihan peningkatan kemampuan manajemen media.

Pelatihan yang diikuti para penguat fungsi kehumasan di satker dan polres jajaran ini, diselenggarakan di Hotel Ning Tidar, Kabupaten Magelang, Kamis (25/1).

Dalam arahnya di hadapan para peserta, Kabidhumas Polda Jawa Tengah, Kombes Satake Bayu Setianto menerangkan pelatihan ini penting bagi penguat fungsi humas Polri. "Karena pengelolaan informasi yang dilakukan Polri harus mengandung unsur edukasi, informasi dan menyejukkan masyarakat. Apalagi dalam situasi pemilu dimana muatan negatif dan disinformasi banyak beredar, khususnya di media sosial," kata dia.

Untuk itu, sambungnya, humas Polri harus tampil dengan sajian informasi yang obyektif, cerdas dan mencerahkan masyarakat.

"Dalam menyajikan informasi, humas Polri harus tetap menjunjung tinggi netralitas, karena netralitas TNI-Polri dalam Pemilu itu harga mati," tegas Kabidhumas.

Selain itu, Kabidhumas meminta jajaran memperkuat ke-



Polda Jateng beserta jajarannya Gelar Pelatihan Manajemen media di Magelang

mitraan dan komunikasi dengan media serta wartawan. Tujuannya adalah menciptakan pemahaman bersama dalam menciptakan situasi yang kondusif di masyarakat pada masa kontestasi pemilu 2024.

"Bersama media kita harus bisa menjadi cooling system di masyarakat khususnya pada pemilihan presiden, pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah, yang semuanya akan dilaksanakan pada tahun 2024 ini," tegasnya.

Sementara ketua KPU Kabupaten Magelang, Afifuddin, berharap Polri mampu memainkan perannya dalam menjaga stabilitas kamtibmas selama Pemilu 2024.

Dirinya juga mendorong humas Polri turut mensosialisasikan informasi-informasi terkait pemilu serta rambu-rambu yang harus dipatuhi seluruh

simpatisan dan peserta pemilu.

"Termasuk larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan dalam kampanye seperti menghasut atau mengadu domba, mengancam atau menganjurkan kekerasan, merusak atau menghilangkan APK peserta pemilu," terangnya.

Sedangkan ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, M Habib Shaleh, mengagaskan agar para ASN termasuk TNI Polri, selalu menjunjung tinggi netralitas dalam pemilu dan Pilkada.

Disebutnya, Bawaslu berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap netralitas seperti yang tertuang dalam pasal 93 Undang-undang Pemilu tahun 2017.

"Netralitas ASN ini juga merupakan amanat dari Undang-undang dimana ASN harus netral dan bebas dari intervensi politik," tuturnya. (Suroto A.S)

Pemkab Kendal Laksanakan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Kendal, SMN - Pemerintah Kabupaten Kendal melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah, pada hari Kamis (25/1) bertempat di Pendopo Tumengung Bahurekso Kendal.

Dalam laporannya, Pih. Sekda Kendal, Agus Dwi Lestari menyampaikan, bahwa penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 antara Bupati Kendal dengan Kepala Perangkat Daerah dilindungi Pemerintah Kabupaten Kendal sebagai langkah awal bagi setiap kepala Perangkat Daerah, dan segera mengambil langkah strategis dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan.

Ia juga menjelaskan, tujuannya adalah sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, serta menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

"Selain itu, sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi, dan sebagai dasar pemberian amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja penerima amanah, serta sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai," tambah Agus Dwi Lestari.

Sementara Wakil Bupati Kendal, Windu Suko Basuki, dalam sambutannya menyampaikan,



Wakil Bupati Kendal bersama tiga pimpinan Perangkat Daerah dilindungi Pemerintah Kabupaten Kendal

bahwa penandatanganan perjanjian kinerja ini merupakan suatu keharusan bagi para Perangkat Daerah dilindungi Pemerintah Kabupaten Kendal, dalam upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggung jawab.

"Selain itu, merupakan langkah awal agar Perangkat Daerah bisa bergerak cepat melaksanakan program-program kegiatan sesuai target pembangunan daerah yang telah direncanakan pada tahun 2024 ini," kata Windu.

Ia juga menerangkan, melalui perjanjian ini, maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan bersama atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang, serta sumber daya yang tersedia.

"Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun berjalan, tetapi termasuk dampak

outcome yang seharusnya terwujud dari kinerja tahun-tahun sebelumnya, dan perjanjian ini untuk mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel," ungkap Windu.

Pihaknya juga mengungkapkan, Penyusunan Perjanjian Kinerja sendiri menjadi salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Kendal Nomor 18 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.

Lebih lanjut, Windu Suko Basuki mengatakan, Pemerintahan Kabupaten Kendal harus memiliki integritas yang kuat, sehingga mampu mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan,

dan akuntabel. "Salah satu perwujudannya melalui pelaksanaan budaya pemerintahan yang peka terhadap perubahan, mampu beradaptasi dengan pesatnya laju teknologi informasi, dan mampu melayani secara prima dengan sepenuh hati," tutur Windu.

Windu Suko Basuki juga berharap, penandatanganan perjanjian kinerja ini bukan sekedar simbolis melegalkan apa yang akan dilakukan pemerintah. Tetapi, nantinya ditunjukkan dengan hasil-hasil kinerja apa yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, dan mulai hari ini, semua kegiatan di Perangkat Daerah untuk segera diakselerasi pelaksanaannya.

Acara dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kinerja secara simbolis oleh Wakil Bupati Kendal dan tiga pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.

Sedangkan salah satu pejabat yang ikut melakukan penandatanganan perjanjian kinerja, Camat Weleri, Dwi Cahyono Suryo menyatakan siap melaksanakan apa yang sudah tertuang dalam perjanjian kinerja tersebut, yang mana bukan hanya sekedar kerja rutinitas, namun dibutuhkan kreativitas, inovatif, adaptif, dan kerja kolaboratif.

"Kami sangat berkomitmen untuk bekerja lebih baik lagi, karena yang terpenting tidak hanya outputnya saja tetapi outcomenya yang lebih untuk melayani masyarakat," tutur Dwi Cahyono Suryo. (Suroto A.S)

Paripurna Pertama Tahun 2024 DPRD Sampang Dengarkan Nota Penjelasan Raperda Eksekutif

Sampang, SMN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang menggelar Rapat Paripurna Rapat dengan Agenda Nota Penjelasan Terhadap Satu Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif dan Nota Penjelasan Bupati Terhadap Dua Raperda Eksekutif, digelar Kamis (18/1).

Dalam sidang Paripurna pertama tahun 2024 itu, pimpinan sidang yang dipimpin oleh Wakil ketua DPRD Sampang, Amin Arif Tirtna sebelum mempersilahkan Perwakilan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sampang untuk menyampaikan Nota Penjelasan terhadap satu Raperda Inisiatif, Amin terlebih dahulu mempersilahkan Wakil Bupati Sampang Abdullah Hidayat yang mewakili Bupati Sampang untuk menyampaikan Nota Penjelasan Bupati Terhadap Dua Raperda Eksekutif.

Dalam kesempatan tersebut, Abdullah Hidayat mengatakan, kalau pihaknya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan DPRD yang telah memberikan kesempatan kepada pihaknya untuk menyampaikan Nota Penjelasan terhadap Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dan Raperda tentang Rencana



Paripurna Pertama Tahun 2024 DPRD Sampang Dengarkan Nota Penjelasan Raperda Eksekutif

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang Tahun 2024 - 2044.

Berdasarkan ketentuan Pasal 94 Ayat 3 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh wajib dilakukan oleh pemerintah daerah, dan/atau setiap orang.

"Tujuan dari pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh adalah untuk mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan guna mendukung kemandirian dan produktivitas masyarakat," jelasnya.

Kualitas perumahan dan kawasan permukiman yang layak

huni secara ideal perlu didukung dengan kualitas lingkungan permukiman yang lebih luas sebagai satu kesatuan hunian yang tidak terpisahkan guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

"Peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman diupayakan menjadi salah-satu kondisi yang dapat membantu mengatasi tarikan urbanisasi, mendorong pertumbuhan wilayah, mendukung keterkaitan kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan secara baik, yang sekaligus dapat mewujudkan permukiman di kawasan perkotaan yang mendukung perwujudan pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan secara keseluruhan dan berkelanjutan," pungkasnya. (adv/why)

Anggaran Pelantikan PPS Rp 15 Ribu Dapat 'Konsumsi Lelayu', KPU Sleman Ungkap Alasan

Sleman, SMN - Sehari-hari kemarin, Kamis (25/1), lini massa sosial media dipenuhi unggahan konsumsi pelantikan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di lima kabupaten/kota DIY. Sleman lagi-lagi viral karena kabupaten terkaya di DIY ini memberikan konsumsi layanya konsumsi lelayu.

Banyak muncul beredar, termasuk yang diterima KRjogja.com, bahwa snack hanya berupa air mineral gelas dan roti. Starterpack ini biasanya ada di momen berkabung, yang diberikan keluarga pada pelayat yang

datang ke rumah duka.

Situasi ini sontak mengundang keprihatinan banyak pihak. Padahal, KPU Sleman mengaku bahwa anggaran untuk konsumsi adalah Rp 15 ribu yang kemudian diserahkan pada pihak ketiga menurut aturan sekretariat.

"Kami sangat menyanggalkan kejadian itu dan meminta maaf. Sekretariat KPU Sleman menyediakan snack melalui pihak ketiga atau vendor yang terdaftar dalam e-catalog. Oleh vendor disubkan lagi pengadaannya tanpa sepengetahuan KPU Kabupaten Sleman. Vendor men-

gatakan kalau tidak disubkan maka mereka tidak mampu menyediakan konsumsi untuk pelantikan serentak KPPS yakni 24.199 orang," ungkap Ketua KPU Sleman, Ahmad Baehaqi.

Pihak vendor menurut Baehaqi sebelumnya telah menyetujui dan mengaku siap menyediakan konsumsi sesuai perjanjian kerjasama. Di sisi lain KPU Sleman sudah mengingatkan potensi yang mungkin terjadi untuk pengadaan snack untuk lebih dari 24 ribu orang.

"Anggaran untuk tiap orang adalah Rp 15 ribu persis sudah

potong pajak. Namun, oleh vendor diakui snack itu seharga Rp 2.500. Untuk pagu anggaran transportasi pelantikan di Kabupaten Sleman memang tidak ada, yang ada adalah pada bimtek," jelasnya.

Atas situasi tersebut, KPU Sleman sudah memanggil pihak vendor untuk menjelaskan kejadian secara rinci. KPU Sleman langsung memutuskan kerjasama dengan vendor karena dinilai telah mengingkari perjanjian dan menegaskan tak akan menggunakan jasa vendor bersangkutan kembali. (*)

Warga Andalkan EWS Peringatan Dini Banjir Luapan Bengawan Solo

Sukoharjo, SMN - Alat deteksi dini banjir atau early warning system (EWS) sangat diharapkan warga khususnya yang tinggal disepanjang aliran Sungai Bengawan Solo dalam menghadapi kerawanan bencana alam banjir. Warga akan langsung bersiap mengungsi apabila sirine berbunyi.

Kewaspadaan dilakukan warga mengingat kondisi sekarang curah hujan terus mengalami peningkatan. Di wilayah Kecamatan Grogol ada dua EWS terpasang yakni satu unit di bawah jembatan Bacem Telukan dan satu unit di Dukuh Nusupan, Desa Kadokan, Grogol.

"Keduanya sama pentingnya dan sangat diandalkan. Apalagi alat yang terpasang di Nusupan, Kadokan karena disana wilayah langganan banjir dan sangat di-

andalkan warga disana," ujar Camat Grogol, Herdis Kurnia Wijaya kepada KRjogja.com, Kamis (25/01/2024).

Herdis menjelaskan, khusus untuk EWS di Nusupan, Kadokan selalu dipantau warga setiap saat di musim hujan ini. Sebab kondisi sekarang debit air Sungai Bengawan Solo naik signifikan setelah hujan deras terus mengguyur.

Pemerintah Kecamatan Grogol sudah melakukan pemantauan dan meminta pada Pemerintah Desa Kadokan serta masyarakat setempat untuk selalu waspada terhadap kerawanan bencana alam banjir akibat luapan Sungai Bengawan Solo.

"Beberapa desa lain di wilayah Kecamatan Grogol yang rawan banjir sudah kami minta waspada," lanjutnya.

Herdis menambahkan, karena pentingnya keberadaan EWS dalam memberi peringatan dini banjir maka Pemerintah Kecamatan Grogol meminta pada semua pihak membantu melakukan perawatan. Sebab kerusakan alat sangat terasa dampaknya merugikan masyarakat.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sukoharjo Ariyanto Mulyatmojo mengatakan, BPBD Sukoharjo terus melakukan pemantauan wilayah rawan bencana alam ditengah kondisi perubahan cuaca ekstrem.

"Sudah banyak relawan peduli terhadap bencana alam dan mereka turun membantu masyarakat. Salah satunya memberikan informasi kewaspadaan banjir dengan memantau kondisi sungai atau kali," ujarnya. (*)

Minimalisir Pencemaran Lingkungan, Wabup Minta Produk Pengukur Polusi Udara Diuji



Wakil Bupati Sukabumi H. Iyos Somantri saat menerima audiensi PT Panca Utama Multiprima di Ruang pertemuan Dinas Perhubungan.

Sukabumi, SMN - Wakil Bupati Sukabumi H. Iyos Somantri menerima audiensi PT Panca Utama Multiprima yang dalam kesempatan tersebut mengenalkan alat ukur polusi udara dari kendaraan dan industri. Kegiatan berlangsung di Ruang pertemuan Dinas Perhubungan, Jum'at (26/01/24).

Produk dari PT. Panca Utama Multiprima itu sebagai solusi program pencegahan pencemaran lingkungan baik dari transportasi maupun industri.

Hal itu disambut baik Wakil Bupati, apalagi produk yang

ditawarkan bisa memberikan dampak positif dan pengaruh terhadap lingkungan dari polusi kendaraan dan industri.

"Kalau memang berfungsi dan emisi polutan bisa berkurang, nanti kita uji coba dulu karena harus diyakinkan. Kalau sudah teruji nanti bisa di tindaklanjuti dan dipelajari, mudah mudahan bisa memberikan pengaruh baik terhadap lingkungan," ungkap Wabup.

Hadir pada kesempatan tersebut Kadishub, DLH, Dinas Dagin, Disnaker serta undangan lainnya. (robby)

Penutupan Survival Dasar Sangga Langit, Wabup Apresiasi Kerjasama dengan Lanud Atang Sendjaja



Wakil Bupati Sukabumi H. Iyos Somantri saat mengikuti upacara penutupan Survival Dasar Sangga Langit, Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Atang Sendjaja Tahun 2024

Sukabumi, SMN - Wakil Bupati Sukabumi H. Iyos Somantri mengikuti upacara penutupan Survival Dasar Sangga Langit, Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Atang Sendjaja Tahun 2024, di Pantai Ujunggenteng, Kecamatan Ciracap, Kamis, 25 Januari 2024.

Pelatihan tersebut dilaksanakan di beberapa titik yang berlangsung selama 5 hari dan diikuti sebanyak 45 peserta terdiri dari TNI AU, Satpol PP, Damkar, dan mahasiswa.

Komandan Wing Udara 4 Lanud Atang Sendjaja, Irup Kolonel Pnb, Asep Wahyu Wijaya menyampaikan, bahwa latihan survival dasar sangga langit merupakan satu diantara realisasi program kerja dalam rangka untuk memantapkan kemampuan fisik, mental dan spiritual awak pesawat.

Latihan ini wajib dilaksanakan bagi prajurit TNI, khususnya Angkatan Udara. Selama pelatihan para peserta dibekali strategi-strategi khusus

pada saat menghadapi situasi darurat dalam penerbangan.

"Para peserta latihan dapat mengambil sikap dan tindakan yang tepat ketika menghadapi situasi emergency dalam misi operasional," tegasnya.

Ia berharap, seluruh peserta latihan agar mengaplikasikan pengetahuan yang didapat selama pelatihan berlangsung.

Sementara itu, Wakil Bupati Sukabumi H. Iyos Somantri mengatakan, pelatihan survival dasar sangga langit yang diselenggarakan selama 3 hari di Pantai Ujunggenteng merupakan sebuah kehormatan bagi Kabupaten Sukabumi.

Maka dari itu tutur H. Iyos, kedepan kolaborasi antara Pemda Sukabumi dan Lanud Atang Sendjaja akan semakin terjalin dengan baik, bahkan pengembangan pelatihan di tempat tersebut akan semakin ditingkatkan.

"Insya Allah kami punya aparat seperti Satpol PP, Damkar, dan lainnya untuk diikutsertakan dalam pelatihan survival ini ditahun depan," tandasnya. (robby)

Rapat Penanganan Bencana Longsor Cibadak, Sekda Minta Percepatan dan Kolaborasi Lintas Sektor

Sukabumi, SMN - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman memimpin rapat penanganan bencana tanah longsor Cibadak di Pendopo, Jumat, 26 Juni 2024. Rapat yang melibatkan berbagai perangkat daerah ini, membahas penanganan bencana secara jangka pendek maupun panjang.

Dalam arahannya, Sekda meminta kolaborasi dalam percepatan penanganan bencana. Terutama dari semua unsur perangkat daerah.

"Kita harus kolaborasi dalam membantu semua korban bencana. Mari kita berikan yang terbaik," ujarnya.

Dari sisi penanganan jangka pendek misalnya, semua kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana harus terpenuhi mulai dari masalah sandang ataupun papan.

"Setiap perangkat daerah akan berperan sesuai tugas dan fungsinya. Dari sisi kesehatan misalnya, Dinas Kesehatan akan

menambah petugas kesehatan dan meningkatkan pelayanannya," ucapnya.

Tak hanya itu saja, sedang disiapkan tim trauma healing dari DP3A Kabupaten Sukabumi untuk membantu korban terdampak bencana dalam mengurangi traumanya.

"Tim trauma healing mulai turun. Selain itu, anak yang berstatus pelajar akan melibatkan Dinas Pendidikan. Hal itu untuk membantu berbagai keperluan pendidikan," ungkapnya.

Berkaitan kebutuhan di tempat pengungsian, tim logistik sedang melengkapi dapur umum termasuk pasokan air bersih, dan berbagai kebutuhan lainnya.

"Kita akan berupaya semaksimal mungkin membantu mereka," bebarnya.

Sementara terkait pembersihan material longsor, Pemerintah Kabupaten Sukabumi sedang mengkaji terlebih dulu. Mengingat kondisi di lapangan.

"Banyak pertimbangan yang harus kami pikirkan dalam pem-



Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman saat memimpin rapat penanganan bencana tanah longsor Cibadak di Pendopo.

bersihan material. Sehingga, tidak bisa asal membersihkan. Termasuk harus mempertimbangkan material longsor yang masih berpotensi meluncur ke bawah," terangnya.

Sementara dari sisi jangka panjang, salah satu yang dibahas terkait relokasi. Namun hal itu masih menunggu harapan masyarakat termasuk berbagai kajian.

"Kita memastikan terlebih

jumlah korban yang terdampak. Termasuk yang berada di zona merah. Selain itu mengkaji berbagai hal, termasuk lokasi relokasi dan keinginan warga," jelasnya.

Sekda berharap, penanganan bencana ini bisa cepat terselesaikan. Sehingga, masyarakat yang terdampak bisa beraktifitas kembali seperti sedia kala.

"Mari kita maksimalkan kemampuan kita dalam membantu mereka," ucapnya. (robby)

Bupati dan Wabup Labusel Hadiri Peresmian Kantor Camat Kampung Rakyat



Bupati dan Wabup Labusel hadir peresmian Kantor Camat Kampung Rakyat

Labuhanbatu, SMN - Bupati Labuhanbatu Selatan Edimin Dan Wabup Labuhanbatu Selatan Ahmad Padli meresmikan Kantor Camat Kampung Rakyat yang terletak di Desa Tanjung Medan Peresmian tersebut

di tandai dengan pengantungan pita oleh Bupati, Rabu (24/1/2024).

Dalam peresmian tersebut, Bupati mengatakan, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan segala upa-

ya selalu berkeinginan untuk melakukan pembangunan di semua bidang, baik kesehatan, pendidikan, pelayanan publik, terutama infrastruktur.

Lanjut Edimin, dengan diresmikannya Kantor Camat Kampung Rakyat tersebut diharapkan tidak hanya memberi rasa nyaman bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Camat Kampung Rakyat, tapi juga masyarakat secara keseluruhan.

"Saya berharap dengan di resmikannya gedung kantor Camat Kampung Rakyat ini, kepada Camat dan seluruh staf Kecamatan Kampung Rakyat berikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, jalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan sosialisasikan kepada masyarakat bahwa penugasan KTP sudah bisa di kantor Camat," ungkap Edimin.

Bupati juga mengajak dan berharap kepada seluruh lapisan

masyarakat untuk menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

"Saya mengajak kepada para alim ulama, tokoh agama dan tokoh masyarakat mari kita sama sama menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif, saat ini kita sudah memasuki tahun politik saya mengajak dan menghimbau kepada kita semua jangan sampai kita menjadi korban politik, mari kita jaga persatuan dan kesatuan jangan sampai kita terpecah belah karena pilihan yang berbeda," ungkapnya.

Terakhir Bupati berpesan, dengan berdirinya gedung kantor yang baru ini semoga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memudahkan proses administrasi di Kecamatan Kampung Rakyat dengan diiringi inovasi-inovasi terbaru, serta prestasi kerja yang berintegritas. (jr)

Pemkab Labuhanbatu Selatan Peringati Hari Kesadaran Nasional

Labuhanbatu, SMN - Bupati Labuhanbatu Selatan Edimin Hadiri Upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN) yang digelar di halaman Kantor Bupati Labuhanbatu Selatan, Rabu (17/1/24).

Bertindak sebagai pembina Upacara Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Ahmad Padli yang dihadiri seluruh ASN dan Tenaga PPDPK dilingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Wabup mengatakan, HKN memiliki makna penting untuk memantapkan kualitas pengabdian serta meningkatkan kecintaan kepada bangsa dan Negara. Dan menjadi semangat untuk mewujudkan visi Labuhanbatu Selatan yang sejahtera dan bermartabat.

"Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan melalui Dinas Ketenagakerjaan adalah melindungi pekerja / buruh melalui penetapan upah minimum Kabupaten Kota atau yang sering disingkat dengan UMK," ucap Wabup.

Dikatakan Wabup, penetapan kebijakan pengupahan tersebut sebagai salah satu upaya mewujudkan hal pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, kebijakan penetapan upah minimum dilakukan setiap tahun.

"Berdasarkan peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2023 tentang pengupahan, maka pada tahun 2024 Gubernur Sumatera Utara melalui rekomendasi Bupati Labuhanbatu Selatan telah menetapkan upah minimum Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk tahun 2024 sebesar Rp. 3.197.168," ungkap Wabup

Terakhir Wabup menghimbau kepada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Labuhanbatu Selatan melakukan monitoring dan pengawasan agar upah minimum Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2024 dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Apabila ada pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap aturan pengupahan dengan membayar upah pekerja/buruhnya dibawah upah minimum tahun 2024 agar dinas ketenagakerjaan melakukan penindakan sesuai aturan yang berlaku," tutup Wabup. (jr)



Pemkab Labusel peringati Hari Kesadaran Nasional

DPRD Labuhanbatu Gelar Acara Pengambilan Sumpah Jabatan PAW Anggota DPRD

Labuhanbatu, SMN - Wakil Bupati Labuhanbatu Ellya Rosa Siregar menyaksikan pengambilan sumpah janji jabatan pengganti antar waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu sisa jabatan

2019-2024 di gedung paripurna DPRD Kabupaten Labuhanbatu, jalan SM Raja Rantauprapt Kecamatan Rantau Selatan. Jum'at (19/1/24).

Usai pengambilan sumpah, Ellya Rosa Siregar mengucapkan

kan selamat kepada pejabat antar waktu anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu yang baru dilantik.

"Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu saya mengucapkan selamat kepada Ramadan Ritonga yang dilantik sebagai pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu sisa masa jabatan 2019-2024," ucap wabup Ellya Rosa.

Pengantunan antar waktu yang sudah melalui prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ini menandakan proses demokrasi di labuhanbatu sudah berjalan sesuai dengan koridornya.

Kepada terlantik, Wabup berpesan, perlu disadari bahwa amanah yang telah dititipkan kepada kita semua agar

dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan mari kita bersama-sama membangun Kabupaten labuhanbatu yang kita cintai ini agar menjadi lebih baik kedepannya dan berguna untuk masyarakat yang ada di Kabupaten labuhanbatu.

Pada kesempatan itu, Ellya Rosa mengajak kepada Ramadan Ritonga SE untuk dapat menjalani dan bekerjasama yang baik dengan sesama anggota DPRD dan dapat bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam rangka percepatan pembangunan mewujudkan visi misi Kabupaten Labuhanbatu yaitu terwujudnya masyarakat labuhanbatu yang berkarakter maju dan sejahtera tahun 2024.

Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu Meika Riyanti Sire-

Bupati Mukomuko Mutasi Pejabat Eselon II, III dan IV Pemkab Mukomuko

Mukomuko, SMN - Mutasi eselon II, III dan IV, serta pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko Bengkulu bergulir, Kamis (25/01/2024).

Pelantikan dan pengambian sumpah jabatan 8 orang pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) dan 23 orang pejabat administrator (eselon III) dan lagi 32 orang pejabat pengawas (Eselon IV) 5 orang pejabat fungsional, mutasi ini di pimpin langsung Bupati Mukomuko H. Sapuan.

Proses pelantikan sejumlah pejabat berlangsung di Aula Bappellitbangda Kabupaten Mu-

komuko, dan di saksikan oleh Asisten Bidang pemerintahan dan Kestra Haryanto SKM, dan Kepala BKP-SDM Mukomuko, Wawan Santoni.

Tampak hadir Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) atau mewakili dan Kepala OPD di lingkungan Pemkab Mukomuko.

"Mutasi ini untuk penyegaran dan optimalisasi kinerja di tahun 2024," ujar Bupati.

Bupati berharap kepada sejumlah pejabat yang di mutasi

dengan adanya amanah jabatan baru, sedapat mungkin menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang baru.

"Kita berharap jalani tugas dengan amanah, dengan hati nurani dan pikiran yang ikhlas," harap Bupati.

"Kita juga minta semua pejabat di lingkungan Pemkab Mukomuko, baik yang dilantik hari ini, maupun lainnya betul betul kerja lebih serius lagi, tingkatkan kinerja dari tahun kemarin," tutup Bupati. (burhan)



Bupati Mukomuko memimpin langsung Mutasi eselon II, III dan IV, serta pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko



Wabup Labuhanbatu hadir pelantikan PAW anggota DPRD

Pasar Mukomuko Hasilkan PAD Ratusan Juta

Mukomuko, SMN - Dinas perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Disprindagkop UKM) Kabupaten Mukomuko terus mengejar pendapatan Asli Daerah (PAD), dari sektor pasar sebanyak 16 pasar dari 37 pasar yang ada di daerah ini, sehingga pasar di Mukomuko menyumbang PAD hingga Ratusan juta per tahunnya.

ar yang menyumbang PAD ini meliputi seluruh kecamatan di daerah ini. "Pasar yang ditarik retribusi yakni pasar-pasar yang ada bangunan dari pemerintah (pasar kecamatan). Sedangkan pasar tradisional (pasar desa) belum ditarik," kata nurdiana. Menurutnya, setiap tahun PAD dari sektor pasar targetnya selalu naik dan realisasinya cukup baik. Tahun ini PAD dari sektor pasar di targetkan sebesar Rp.285 juta. Sedangkan untuk target PAD metrologi sebesar Rp.100 juta, sehingga totalnya Rp385 juta, sedangkan tahun lalu targetnya Rp255 juta.



Pit kepala disprindagkop UKM kabupaten mukomuko, nurdiana

"Untuk target PAD dari retribusi pasar dan metrologi di daerah kita ini Rp.385 juta dan semoga bisa realisasi 100 persen lebih seperti tahun 2022 lalu," pungkas nurdiana. (burhan)

Wakil Bupati Asahan Lepas Tim Sepakbola SSB Mezzaluna Asahan

Asahan, SMN - Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar, di dampingi Kapolres Asahan AKBP Afidhal Junaidi melepas Tim Sepak Bola SSB Mezzaluna Asahan yang mewakili Provinsi Sumatera Utara untuk mengikuti kompetisi Piala Soeratin U15 di tingkat Nasional, Rabu (17/01/2024) bertempat di Halaman Kantor Bupati Asahan

atit muda yang telah mampu melakukan pencapaian yang sangat luar biasa ini. "Melalui pelepasan ini, saya berpesan kepada manager, official dan pelatih, agar betul-betul mengawasi para pemain kita, dan kepada para pemain betul-betul disiplin, menjaga stamina, kesehatan, dan latihan yang rutin. Semoga tim sepak bola Sumatera Utara yang di Wakili oleh Kabupaten Asahan meraih prestasi yang terbaik pada turnamen Soeratin U15 kali ini," pesan Wakil Bupati. (in)



Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar, di dampingi Kapolres Asahan AKBP Afidhal Junaidi melepas Tim Sepak Bola SSB Mezzaluna Asahan yang mewakili Provinsi Sumatera Utara

KPU Gelar Bimtek Training Of Trainers kepada Seluruh PPK dan PPS se-Kabupaten Tanggamus



KPU Tanggamus menggelar Training Of Trainer Fasilitator Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Tanggamus

Tanggamus, SMN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanggamus menggelar Training Of Trainer Fasilitator Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Tanggamus di Hotel Royal Gisting dan Hotel 21 Gisting, Selasa (23/01/2024). Hadir langsung Ketua KPU Tanggamus, Angga Lazuardi, Ketua Bawaslu Tanggamus Najih Mustofa dan Komisioner KPU Kabupaten Tanggamus, Amhan Sholihin dan seluruh peserta PPK, PPS di 6 kecamatan se-Kabupaten Tanggamus. Kegiatan bimtek dilaksanakan selama 2 hari, mulai dari 22 Januari hingga 23 Januari 2024. Kemudian materi yang akan disampaikan terkait teknis pelaksanaan persiapan TPS hingga teknis tungsura manual hingga penggunaan aplikasi

pembekalan teknis dalam persiapan pelaksanaan hingga rekapitulasi penghitungan di TPS "Melalui kegiatan ini Angga Lazuardi menghimbau agar PPK dan PPS se-Kabupaten Tanggamus selalu menjaga soliditas, integritas dan sinergitas antar penyelenggara pemilu agar gelaran Pemilu serentak 2024 bisa berjalan lancar dan sukses," ungkapnya. Komisioner KPU, Amhan Sholihin, S.Ag. dalam arahnya sebelum mengisi materi menekankan kepada peserta bimtek agar konsentrasi dan serius untuk mengikuti bimtek, agar dapat menyerap semua materi, teknis yang termuat dalam PKPU nomor 25 tahun 2023. "Untuk menjelang pelantikan KPPS secara serentak pada tanggal 25 Januari 2024 nanti, hari ini KPU Kabupaten Tanggamus mengadakan Bimtek training kepada PPK dan PPS di 6 kecamatan Kabupaten Tanggamus untuk memahami secara teknis persiapan TPS hingga pemungutan suara serta rekapitulasi penghitungan suara, yang harus disampaikan kepada kpps sebagai bekal dalam pelaksanaan pemungutan suara nanti," tandasnya. Dengan bimtek training of Trainer diharapkan PPS dan KPPS dapat melayani peserta pemungutan suara pada 14 Februari 2024 nanti, sesuai dengan aturan, juknis dan tatacara prosedur yang sudah diberikan dalam pembekalan dalam pelaksanaan Pemilu 2024," tutupnya Amhan Sholihin. (yuliar)

Wakil Bupati Asahan Tekan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan Gunakan Media Sosial Secara Bijak

Asahan, SMN - Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar, menekankan kepada ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan agar menggunakan media sosial dengan cara yang bijak saat memasuki tahun pemilu 2024. "Jangan lakukan hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri. Karena selaku ASN kita harus bersikap netral tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon," ujar Wakil Bupati saat menyampaikan amanatnya di upacara Hari Kesadaran Nasional di Halaman Kantor Bupati Asahan, Rabu (17/01/2023).

di wilayah masing-masing sesuai dengan tupoksi yang dimiliki. "Pedomani ketentuan yang telah diatur oleh KPU dan pantau pelaksanaan pemilu agar terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan," harapnya. Selain itu Wakil Bupati Asahan berharap kepada OPD dan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. "Tahun ini, merupakan tahun terakhir kami melaksanakan tugas sebagai Bupati dan Wakil Bupati Asahan, untuk itu kami berharap, apa yang telah diprogramkan dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya



Wakil Bupati saat menyampaikan amanatnya di upacara Hari Kesadaran Nasional di Halaman Kantor Bupati Asahan

ya sehingga kami dapat mempertanggungjawabkan diakhir masa jabatan," pinta Wakil Bupati kepada OPD dan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan. Terlihat Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, Para Asisten, Staf Ahli Bupati Asahan, OPD dan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan ikuti upacara Hari Kesadaran Nasional dengan begitu khidmad. (in)

UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan Berubah Status Menjadi BLUD



Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Asahan John Hardi Nasution, selaku tim pembina BLUD, saat melakukan monitoring dan evaluasi ke BLUD UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan

Asahan, SMN - UPTD laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan telah berubah status menjadi Badan Layanan Umum Daerah

(BLUD). Dengan perubahan status tersebut, Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan dapat merubah sistem yang diterapkan menjadi lebih

baik serta dapat merubah pengelolaan tata keuangan, sehingga dapat mengembangkan potensi bisnis dan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Asahan John Hardi Nasution, selaku tim pembina BLUD, saat melakukan monitoring dan evaluasi ke BLUD UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan didampingi Asisten 2, Kadis Lingkungan Hidup dan Kabag Organisasi Kabupaten Asahan, Kamis (18/01/2023). Selanjutnya Sekda berharap kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dapat menjaga dan mengoperasikan Laboratorium dengan sebaik-baiknya serta

memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat khususnya masyarakat Asahan secara maksimal. Terakhir Sekda meminta Dinas Lingkungan Hidup agar dapat membantu Pemerintah Kabupaten Asahan dalam menukseskan Kabupaten Asahan yang Sejahtera, Religius dan Berkeadilan. Di kesempatan tersebut Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan H. Rahmat Hidayat Siregar berharap kepada pelaku usaha baik di Kabupaten Asahan maupun diluar Kabupaten Asahan untuk dapat menguji kelayakan air, udara, dan tanah di BLUD UPTD Laboratorium Dinas lingkungan Kabupaten Asahan. (in)

Gandeng UMJ, Lintas Organisasi di Lampung Rencanakan Uji Kompetensi Wartawan Tahun 2024

Tanggamus, SMN - Wartawan dari berbagai organisasi media di Lampung bersiap-siap untuk sebuah acara besar tahun ini. Dalam sebuah langkah kolaboratif yang luar biasa, lintas organisasi wartawan sepakat untuk menggandeng Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) dalam penyelenggaraan Ujian Kompetensi Wartawan (UKW) 2024. Keputusan ini diambil dalam pertemuan lintas organisasi wartawan di Kabupaten Tanggamus Lampung yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan standar kualitas wartawan di wilayah tersebut. Dengan melibatkan UMJ, diharapkan

UKW Massal 2024 akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi perkembangan dunia jurnalistik di Lampung. Ketua Pelaksana Kegiatan, Kosri, selaku bendahara Forum Wartawan Kompeten Kabupaten Tanggamus (FWK-KT) mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak penyelenggara FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) sebagai Lembaga Penguji Kompetensi Wartawan. "Koordinasi itu dilakukan setelah adanya Surat Keputusan Dewan Pers Nomor: 18/SK-DP/III/2020 Tentang Penetapan Prodi Ilmu Komunikasi FISIP UMJ sebagai Lembaga Penguji

Kompetensi Wartawan," kata Kosri, Rabu, 24 Januari 2024. Kosri berharap dengan kolaborasi ini, diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas wartawan di Lampung melalui UKW Massal 2024. "Ini adalah kesempatan bagi para wartawan untuk mengukur dan meningkatkan kemampuan mereka serta mendapatkan sertifikasi UKW," ujarnya. UKW massal ini tidak hanya menarik perhatian wartawan yang ingin mengasah keterampilan, tetapi juga diharapkan dapat menciptakan ikatan lebih kuat antara lembaga pendidikan dan praktisi media. "Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan nantinya akan terjalin kolaborasi yang lebih erat dalam mendukung pengembangan dunia jurnalistik di Lampung," harapnya. Para wartawan yang berminat mengikuti dan menjadi peserta UKW Massal 2024 dapat mengikuti berbagai ujian yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan etika jurnalistik. "Dengan dukungan berbagai organisasi wartawan dan perguruan tinggi, acara ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam meningkatkan profesionalisme wartawan dan kualitas informasi yang disajikan kepada masyarakat Lampung," beber Kosri. Ditambahkannya, untuk jen-

jang UKW diantaranya jenjang Wartawan Muda, Jenjang Wartawan Madya dan Jenjang Wartawan Utama. Kepada para awak media di Lampung yang berminat dapat berkoordinasi melalui group WhatsApp Admin masing-masing ketua organisasi atau ketua pelaksana WhatsApp Ketua Pelaksana, 0821-7724-1755. Hingga saat ini, sejumlah organisasi telah menyatakan persetujuannya untuk mengikuti UKW Lintas Organisasi 2024 diantaranya di Kabupaten Tanggamus diantaranya :

1. Forum Wartawan Kompeten Kabupaten Tanggamus (FWK-KT).
 2. Komite Wartawan Indonesia (KWI)
 3. Asosiasi Jurnalis Online Lampung (AJO-L)
 4. Komite Wartawan Indonesia Perjuangan (KWI-P)
 5. Perkumpulan Ikatan Jurnalis Tanggamus (PIJT)
 6. Solidaritas Pers Indonesia (SPI)
 7. Ikatan Penulis Jurnalis Indonesia (IPJI) Tanggamus.
- Sementara itu di Kabupaten Pringsewu diantaranya :
1. Forum Wartawan Kompeten (FWK)
 2. Front Jurnalis Independent (FJI)
 3. Forum Komunikasi Wartawan Kabupaten Pringsewu (FKWKP)
 4. Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI)
 5. Persatuan Pemuda Warga Indonesia (PPWI).
- Selain organisasi tersebut, wartawan non organisasi juga akan turut serta dalam pelaksanaan UKW yang jika tidak ada kendala dijadwalkan akan digelar pada bulan Mei 2024. (yuliar)



LEMBAGA UJI KOMPETENSI WARTAWAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA DAN LINTAS ORGANISASI WARTAWAN PROVINSI LAMPUNG

JAGA DESIGN Mengerjakan Hub : Nota, Banner, Vandel, Spanduk, Souvenir 082231838798 dll

SUARA MEDIA NASIONAL KINI ADA VERSI DIGITALNYA! QR code and digital version image

Nenek Sebatang Kara di Tuban Ditemukan Tewas Gantung Diri

Tuban, SMN - Seorang nenek berinisial L (63), warga Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, ditemukan tewas gantung diri di kontrakkannya pada Jumat (26/01/2024). Belum diketahui pasti motif korban nekat bunuh diri.

Jasad korban pertama kali ditemukan oleh warga bernama Samonah (60). Saat itu, dia curiga dengan bau busuk yang menyengat. Setelah dicek, ternyata korban yang tinggal sebatang kara ini sudah dalam posisi tergantung dengan menggunakan tali.

"Saya tahunya saat mencium bau busuk di sekitar dikontrakkan. Terus tadi dilihat anak-

anak sudah keadaan meninggal dunia. Langsung dilaporkan ke pak RT," kata Samonah.

Sementara itu, Kapolsek Montong Iptu Wachid Nurcahyo membenarkan kejadian bunuh diri dengan cara gantung diri tersebut. Ia menyebutkan pihaknya yang mendapatkan laporan adanya warga meninggal dengan cara gantung diri, langsung mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP).

"Sekitar jam 10 pagi dilaporkan bahwa ada warga meninggal dunia. Saat dievakuasi korban yang tinggal sendiri ini sudah dalam keadaan gantung diri. Perkiraan korban meninggal sudah tiga hari," ungkap Wachid.



Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di sebuah kontrakan di Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, lokasi kejadian seorang nenek ditemukan tewas gantung diri.

Setelah dilakukan evakuasi, lanjut Wachid, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Daerah (RSUD) dr Koesma Tuban untuk dilakukan pemeriksaan oleh tim medis.

Sementara untuk motif korban mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri masih diteliti oleh pihak kepolisian. "Untuk motif masih kita teliti," pungkasnya. (si)

Hujan Deras dan Angin Kencang Hantam Jombang, Belasan Rumah Rusak dan Sejumlah Pohon Tumbang



Petugas saat memotong pohon tumbang di Jalan Soekarno-Hatta Dusun Babatan, Desa Kepuhkembang, Kecamatan/Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu (24/01/2024).

Jombang, SMN - Hujan dan angin kencang melanda wilayah Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Akibatnya, belasan rumah warga di sejumlah desa dilaporkan rusak, serta beberapa pohon peneduh jalan ikut tumbang, Rabu (24/01/2024).

Soleh, salah seorang warga menceritakan, sejumlah rumah rusak setelah diterjang angin kencang di Dusun Weru, Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang. "Di Dusun Weru RT 6 RW 4, ada sekitar enam rumah terdampak," terangnya.

Soleh mengatakan, kejadian angin kencang berlangsung sekitar pukul 16.30 Wib, yang diawali hujan deras.

"Desa Kepuhkembang, dilaporkan sekitar lima rumah rusak akibat angin kencang. Termasuk sebuah warung di pinggir jalan," paparnya.

Sementara itu, Kades Candimulyo Sufredo Herlan mengatakan, di Desa Candimulyo, Kecamatan Jombang, dilaporkan dua rumah rusak berat. "Ada dua rumah terdampak angin kencang di Jl Hayam Wuruk," ungkapnya.

Sufredo menjelaskan, dua rumah itu mengalami kerusakan. Atapnya hancur. "Besok kami akan kerja bakti untuk penanganannya," pungkasnya.

Pranowo, sejumlah pohon tumbang di antaranya di Dusun Babatan, Desa Kepuhkembang dan di Jl. Raya Mastrip, Desa Kepuhkembang.

"Kemudian di Jl Hayam Wuruk Kecamatan Jombang, sebuah pohon tumbang menutup jalan dan kini ditangani oleh DLH," ujarnya.

Bambang menjelaskan, selain itu pohon tumbang juga terjadi di Jl. Gus Dur. Kondisi serupa juga terjadi di ruas Jl. Peterongan-Sumbermulyo. Di lokasi ini pohon tumbang menutup jalan dan ditangani oleh warga setempat.

"Di Stadion Merdeka pohon tumbang menimpa sebuah mobil. Saat ini proses penanganannya. Dan rumah yang terkena dampak angin masih dalam pendataan, kini tim masih di lapangan melakukan pendataan," tutupnya. (si)

Kemas Sabu Dalam Kotak Makanan Ringan, Pemuda di Aceh Timur Ditangkap Polisi



Az (20) Tersduga Pengedar Sabu yang diamankan Satresnarkoba Polres Aceh Timur.

Aceh Timur, SMN - Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Timur mengamankan seorang terduga pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika berinisial AZ (20) warga Desa Meunasah Teungoh, Kecamatan Pante Bidari. AZ diamankan petugas di wilayah Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur pada Senin,

(22/01/2024) sekira pukul 15:30 WIB lalu.

Kapolres Aceh Timur AKBP Nova Suryandaru, melalui Kasatres Narkoba Iptu Yudha Prasatya, Kamis, (25/1/2024) menyebutkan, dari AZ (20) petugas menyita barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat bruto 26,22 gram juga satu unit sepeda motor Honda

Scopy Nomor Polisi BL 4397 VN dan satu unit handphone.

Saat diamankan terduga pelaku sempat mengelak, sebelum petugas menemukan barang bukti yang dikemas dengan menggunakan kotak snack (makanan ringan).

"Modus terduga pelaku saat mengedarkan barang haram tersebut terbilang cukup rapi, meski demikian, anggota kita tetap bisa mengetahui perbuatannya," kata Yudha.

Dikatakan, terduga pelaku serta barang bukti kini diamankan Satresnarkoba Polres Aceh Timur.

"Atas perbuatannya AZ dipersangkakan Pasal 112 ayat (2) jo pasal 114 ayat (2) UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 6 (enam) tahun maksimal 20 (dua puluh) tahun penjara atau seumur hidup atau hukuman mati." Tegak Kasat Narkoba. (si)

Polres Parigi Moutong Gelar Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu



Polres Parigi Moutong menggelar Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu, bertempat di Aula Sanika Satyawada Polres Parigi Moutong.

Parigi Moutong, SMN - Kapolres AKBP Jovan Reagan Sumual, di dampingi Sat Resnarkoba Polres Parigi Moutong IPTU Nasir Mangaseng dan Kasi Humas J.A. Turangan, melaksanakan Konferensi pers tentang Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu, bertempat di Aula Sanika Satyawada Polres Parigi Moutong, Rabu 24 Januari 2024.

Kapolres AKBP Jovan Sumual, dalam keterangan pers mengungkapkan tentang pelaku penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu, yang terjadi di Desa Lambanau, Kecamatan Ongka Malino, Kabupaten (13/1/2024) dan tersangka berinisial IM (27) yang beralamat di Desa Lambanau Kecamatan Ongka Malino dengan Barang Bukti enam(6) paket Narkotika Jenis Sabu, yang telah dikemas dalam plastik klip bening dengan berat bruto kurang lebih 268,5 gram, kata Kapolres.

AKBP Jovan juga menjelaskan berdasarkan Surat penetapan status barang sitaan, dari Surat Kejaksaan Negeri Parigi Moutong Nomor: B-168/P.2.16/Enz 1/01/2024 tanggal 19 Januari 2024 perihal Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika jenis sabu, Berat awal 6 (enam) paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto 268,5 gram. Setelah dilakukan penimbangan di BPOM palu didapatkan berat netto 265,8698 gram, selanjutnya dilakukan Penyisihan untuk pengujian di BPOM palu sebanyak 0,1079 gram serta Penyisihan untuk pembuktian di Persidangan sebanyak 6.3553 gram, dan Penyisihan untuk dimusnahkan sebanyak 259.4066 gram. Ia juga menjelaskan tentang

Keberhasilan Satuan Narkoba Polres Parigi Moutong melakukan pengungkapan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, akan tetapi Ironisnya, kata AKBP Jovan, penggunaan Narkoba masih saja ditemukan.

"Oleh karena itu sangat diharapkan partisipasi dari elemen masyarakat mulai dari tingkat desa hingga pemerintah Daerah utk membantu Polri dalam rangka upaya atau langkah-langkah pencegahan pengedaran Narkoba didaerah ini, khususnya di Kabupaten Parigi Moutong," jelasnya.

Pasal yang dikenakan yakni Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika "Setiap orang tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman, dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)

tahun, pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Hadir dalam Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu, Pj. Bupati Parigi Moutong Richard Arnaldo Djanggola, bersama Forkopimda, Waka Polres Parigi Moutong Kompol Nana Taryana, Para penyidik, Pejabat Kejaksaan Parigi, Pejabat Pengadilan Negeri Parigi dan Danramil Parigi. (smnnews)

Polresta Cirebon Ungkap Kasus Penemuan Mayat di Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon

Cirebon, SMN - Jajaran Sat Reskrim Polresta Cirebon berhasil ungkap misteri penemuan mayat yang terbungkus kain di Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Peristiwa tersebut berawal dari penemuan jenazah yang terbungkus kain sprei dan terikat di Sungai Wangan Ayam pada Rabu (10/1/2024).

Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni, mengatakan, warga yang menemukan jenazah tersebut segera melaporkannya ke Polsek Susukan kemudian diteruskan ke Polresta Cirebon. Sehingga petugas pun segera melakukan olah TKP, pemeriksaan saksi, hingga penyelidikan lebih lanjut terkait peristiwa tersebut.

"Hasilnya, ternyata jenazah ini merupakan wanita berinisial OP korban KDRI yang dilakukan suaminya sendiri hingga meninggal dunia. Sedangkan tersangka berinisial MM (20), dan keduanya merupakan suami istri asal Kecamatan Susu-



Konferensi pers Polresta Cirebon terkait pengungkap Kasus Penemuan Mayat di Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon

kan, Kabupaten Cirebon," ujar Kombes Pol Sumarni, saat konferensi pers di Mapolresta Cirebon, Senin (22/1/2024).

Ia mengatakan, jajarannya berhasil meringkus MM di Kuta, Bali, pada Senin (15/1/2024). Pasalnya, usai menghabsi nyawa istrinya tersangka langsung kabur ke Rembang Jawa Tengah, sebelum akhirnya diamankan di Pulau Bali. Saat ini, pihaknya juga masih mendalami lebih lanjut terkait kasus tersebut.

senjata tajam hingga meninggal dunia kemudian membuang jenazahnya ke sungai. Kami juga menyita barang bukti berupa kain sprei dan tali yang digunakan membungkus jenazah korban, pisau, golok, pakcaian, buku nikah, dan lainnya," kata Kombes Pol Sumarni.

Selain itu, tersangka juga mengakui nekat menghabsi nyawa korban karena kerap menolak saat diajak berhubungan suami istri. Bahkan, MM yang dikenal sebagai sosok cemburuan sendiri meski mereka telah memiliki anak berusia 11 bulan yang setelah kejadian anak tersebut ditiptikan ke orang tua korban.

"Dari hasil pemeriksaan MM sehari-hari bekerja serabutan dan menikah dengan korban sejak 2021. Tersangka dijerat Pasal 338 KUHP dan atau Pasal 5 huruf a juncto Pasal 44 ayat 3 UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)," ujar Kombes Pol Sumarni. (smnnews)

Lansia di Cilacap Tewas Usai Tenggelam di Saluran Irigasi



Jasad korban saat dievakuasi oleh relawan potensi SAR.

Cilacap, SMN - Seorang lansia berusia 79 tahun berinisial S tewas usai tenggelam di saluran irigasi di Desa Karangasem, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Jumat (26/1/2024) pagi.

Warga sekitar bernama Mus-

tofa (53) sempat melihat korban berjalan di pinggir saluran irigasi sekitar pukul 06.30 WIB. Namun tak berselang lama, saksi sudah tidak lagi melihat korban.

"Saksi kemudian menghubungi keluarga korban karena menduga korban jatuh teng-

gelam dan hilang. Setelah itu melapor ke perangkat desa dan Polsek setempat," ungkap Korpolka Serayu Hilir, Sugeng.

Setelah mendapat laporan, aparat setempat dibantu relawan potensi SAR dan warga sekitar kemudian berusaha mencari ke-

beradaan korban, hingga akhirnya korban ditemukan mengapung dalam keadaan sudah tak bernyawa.

"Korban diduga jatuh akibat terpeleset hingga tenggelam," ujar Sugeng.

Lebih lanjut, identitas korban

diketahui warga RT 02 RW 08 Desa Karangasem, Kecamatan Sampang.

Setelah ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi, kemudian dibawa ke rumah duka. Kejadian tersebut sempat menggerakkan warga sekitar. (si)

SUARA MEDIA NASIONAL

KINI ADA VERSI DIGITALNYA!

SCAN! SCAN!

Mengenal 5 Jenis...

Sambungan dari hal. 1

turan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum.

Melansir dari ketentuan tersebut dijelaskan bahwa Surat Suara merupakan sarana yang digunakan oleh pemilih untuk memberikan suara pada Pemilu. Surat suara juga disediakan sesuai dengan jenis Pemilu yang diselenggarakan di TPS dan TPSLN.

Selain itu, aturan terkait surat Pemilu 2024 juga tertuang dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2023 dalam Paragraf 3 tentang Surat Suara. Dijelaskan, ada lima jenis surat suara berlatar putih dengan lima warna penanda yang berbeda sesuai dengan fungsinya.

Masyarakat Indonesia yang akan melaksanakan pemilihan

umum tersebut harus mengenali kelima jenis surat-surat tersebut. Diketahui, lima surat suara itu terdiri dari pasangan capres-cawapres hingga Caleg DPR RI.

Sebagai informasi dalam rapat di Komisi II DPR telah disepakati surat suara yang akan digunakan sama dengan Pemilu 2019. Kelima jenis surat tersebut terdiri dari beberapa warna yaitu abu-abu, merah, kuning, biru, dan hijau.

Jenis Warna Kertas Pemilu 2024 dan Fungsinya

Berikut ini adalah daftar warna kertas Pemilu 2024 dan keterangan hingga fungsi masing-masing surat suaranya:

- 1. Warna Abu-Abu
Surat suara yang mempunyai warna abu-abu mempunyai fungsi sebagai surat pemilihan umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden. Dalam surat suara ini memuat beberapa

hal yaitu:

- Foto pasangan calon
• Nama pasangan calon
• Nomor urut pasangan calon
• Tanda gambar partai politik dan atau tanda gambar gabungan partai politik pengusung pasangan calon

2. Warna Merah
Surat suara yang mempunyai warna merah digunakan untuk pemilihan umum (pemilu) anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Surat ini memuat beberapa hal yaitu:

- Nomor calon anggota DPD
• Foto calon anggota DPD
• Nama calon anggota DPD

3. Warna Kuning
Surat suara yang mempunyai warna kuning mempunyai fungsi untuk pemilihan umum (pemilu) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Surat ini memuat beberapa hal yaitu:

- Tanda gambar partai politik
• Nomor urut partai politik

• Nomor urut dan nama calon anggota DPR

4. Warna Biru
Surat suara yang mempunyai warna biru mempunyai fungsi untuk pemilihan umum (pemilu) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi. Surat ini memuat beberapa hal yaitu:

- Tanda gambar partai politik
• Nomor urut partai politik
• Nomor urut dan nama calon anggota DPRD Provinsi

5. Warna Hijau
Surat suara yang berwarna hijau mempunyai fungsi untuk pemilihan umum (pemilu) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota. Surat ini memuat beberapa hal yaitu:

- Tanda gambar partai politik
• Nomor urut partai politik
• Nomor urut dan nama calon anggota DPRD Kabupaten/Kota. (Ip6)

Kemenkominfo, BNN...

Sambungan dari hal. 1

Psikolog Klinis dan Influencer, Nanin Aritrana, S.Psi., M.Psi.

Direktur Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemkominfo, yang diwakili oleh Ketua Tim Informasi dan Komunikasi Hukum, Astrid Ramadhia Wijaya, mengungkapkan bahwa upaya pencegahan terus dilakukan secara kolaboratif bersama BNN. Yakni, dalam hal menyediakan dan menyebarkan informasi tentang pencegahan bahaya narkoba dan prekursor narkoba.

Ia menjelaskan Badan Narkotika Nasional (BNN) terus berusaha melakukan percepatan dalam memerangi narkoba dengan mengungkap semangat pemberantasan narkoba. Riset BNN, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa dalam dua tahun terakhir, prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia mengalami penurunan dari

1,95% pada tahun 2021 menjadi 1,73% pada tahun 2023. Meskipun penurunan angka hanya sebesar 0,22 poin, namun lebih dari 300.000 anak bangsa berhasil diselamatkan.

"Narkoba telah masuk ke berbagai sektor dengan masih adanya pekerja yang menggunakan narkoba ketika beraktivitas di kantor. Bahkan, pelajar sudah mencoba narkoba sejak di bangku sekolah menengah pertama," ujarnya.

Sementara itu, Deputi Pencegahan BNN Richard M. Nainggolan mengatakan untuk target bidang pencegahan selama tahun 2023 ini adalah peningkatan ketahanan masyarakat terhadap pengaruh narkoba.

"Tahun 2023 untuk pencegahan, titik beratnya bagaimana meningkatkan ketahanan diri masyarakat untuk menolak narkoba. Sehingga masyarakat tidak mau menyalahgunakan ataupun terlibat dalam peredaran gelap narkoba. Ketahanan

diri masyarakat ini akan kita dituntut dengan meningkatkan ketahanan keluarga dan remaja termasuk teman sebaya untuk menolak narkoba," kata Richard.

Hasil pemetaan yang telah dilakukan BNN selama tahun 2022 juga diketahui terdapat 1.571 kawasan kategori bahaya dan 6.431 kawasan kategori waspada. Hal ini disebut menurun dibanding tahun 2021. "Menunjukkan keberhasilan intervensi pada kawasan itu. Termasuk indeks kapabilitas rehabilitasi BNN pada tahun 2022 meningkat dari level 3,05 atau level 2 menjadi 3,31 menjadi level 3. Ini menunjukkan perbaikan layanan rehabilitasi," tuturnya.

Lebih lanjut Richard M. Nainggolan menyampaikan perlunya memberikan kesadaran akan bahaya narkoba, termasuk penyalahgunaan dari aparat negara hingga multi profesi lainnya dari berbagai lapisan

masyarakat.

Kepala Dinas Kominfo Jatim, Shrelita Ratna Dewi Agustini mengatakan sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika (P4GN) yang dilakukan oleh Pemprov Jatim secara luring melalui pembinaan langsung dan berkala. "P4GN juga dilakukan melalui media sosial dengan konten edukatif terkait bahaya penyalahgunaan narkoba, yang bekerja sama dengan ASN Influencer," ujarnya.

Selain itu Pemerintah Provinsi memfasilitasi penanganan Pecandu dan Korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui pelayanan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. "Diantaranya adalah tindakan medis untuk memulihkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba dari ketergantungan narkoba, dan prekursor narkoba," tambahnya. (kmf/jtm)

Dewan Pers Ajak...

Sambungan dari hal. 1

kanlah debat capres-cawapres. "Debat capres-cawapres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah berakhir pada 4 Februari. Itu merupakan debat terakhir. Kami tidak ingin membuat masyarakat malah bingung jika masih ada debat lagi," kata Ninik.

Ia menambahkan, andai Dewan Pers mengadakan debat dan kemudian terjadi selisih pendapat, maka akan sulit untuk mencari simpul akhir dari perbedaan pendapat yang tajam. Hal ini bisa membuat masyarakat tidak punya informasi yang pasti sehingga kebingungan.

Menurut Ninik, masyarakat pers ingin ketiga capres-cawapres (Anies Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3) bisa hadir dalam deklarasi itu. "Bila ada yang tidak bisa hadir, masyarakat tentu akan menafsirkan

dan bisa memberi penilaian atas komitmen mereka terhadap kemerdekaan pers," paparnya.

Sedangkan Ketua Panitia Deklarasi Kemerdekaan Pers oleh Capres-Cawapres, Totok Suryanto, yang juga anggota Dewan Pers mengutarakan, pemilihan tanggal 7 Februari itu sudah dengan pertimbangan matang agar tidak mengganggu sisa masa kampanye ketiga pasangan calon. "Kami cuma minta waktu satu jam saja untuk ketiga capres-cawapres tidak keberatan dan punya komitmen tinggi terhadap kemerdekaan dan kualitas pers nasional," ujarnya.

Pers, kata Totok, memiliki posisi strategis dalam konstelasi politik nasional. Apalagi, pers merupakan pilar keempat demokrasi. Indeks kemerdekaan pers (IKP) nasional pun ikut mempengaruhi tingkat demokrasi suatu negara.

Tentang permintaan beberapa pihak agar pada acara itu

Dewan Pers juga sekaligus menggelar debat capres-cawapres seputar pers, ia tidak bisa memenuhi hal itu. Dalam pandangan dia, Dewan Pers haruslah bersikap netral dan tidak boleh bermain politik secara langsung. Dia khawatir, jika ada debat, maka akan bisa tergiring pada opini seolah Dewan Pers berperan mengarahkan pilihan pada calon tertentu.

Selain 11 konstituen yang akan menerima komitmen deklarasi capres-cawapres untuk kemerdekaan pers, Dewan Pers juga akan mengundang para pimpinan media massa dan tokoh-tokoh pers. Ia berharap tokoh pers ikut menjadi saksi komitmen para pasangan calon presiden-wapres.

"Kapolda dan panglima TNI juga kami undang. Kedua institusi itu sudah berkomitmen menjaga netralitasnya dalam pemilu. Beliau berdua juga sudah memastikan untuk bisa hadir di acara kami," ungkapnya. (*)

Diskominfo Jatim Gelar...

Sambungan dari hal. 1

Kepala Dinas Kominfo Jatim, Sherlita Ratna Dewi Agustini dalam pengarahannya mengatakan, penyelenggaraan statistik di lingkungan OPD Pemprov Jatim sebagai produsen data diperlukan kerjasama untuk menginput data up-to-date dan cermat untuk mewujudkan ketersediaan data yang mudah diakses dan dibagikan antara produsen data di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

"Dalam kesempatan ini saya mohon disampaikan data yang sudah dijanjikan oleh OPD maka itulah yang diisikan. Saya minta Kabid Dastik evaluasinya tidak boleh tahunan seperti sekarang tetapi evaluasi per tiga

bulan. OPD harusnya awal Januari sudah laporan data, misalnya Diskominfo menjangkakan ada 20 dataset yang baru diisi lima, maka adanya desk inilah yang harus dilakukan kita semua tidak hanya Dinas Kominfo tetapi juga BPS dan Bappeda," kata Kata Kadis Sherlita.

Dipaparkan capaian keterisian data tahun 2023 di portal Satu Data Jatim mencapai 67,47% dari 58 OPD, karena ada OPD yang keterisian data masih 0%, untuk itu pihaknya mengharapkan kerjasama para operator dan verifikasi Satu Data Jatim untuk intens menginput data statistik sektoralnya ke portal Satu Data Jatim sesuai

dengan target dan periode data. Sesuai Surat Edaran Sekdaprov.

Jatim, untuk daftar data tahun 2024 ada 2314, sebanyak 2023 daftar data yang telah diinput di aplikasi Satu Data Jatim atau 87,42%, terbagi atas 968 daftar data telah dibuat kamus data dan sisanya 1055 belum dibuat kamus data. Untuk memberikan apresiasi bag OPD dalam pengelolaan data ini, pihaknya juga tetap akan menyelenggarakan Satu Data Jatim Award 2024 dengan format lebih mudah dan data riilnya serta metode penilaian yang komprehensif nilai data dari OPD dan Kabupaten Kota. (kmf/jtm)

Targetkan Zero New...

Sambungan dari hal. 1

masa depan," ujar Ali, Kamis (25/1/2024).

Terbaru, upaya penurunan stunting dilakukan melalui aksi bakti sosial RABU (RASanya ingin selalu sehat Bersamamu). Dipimpin langsung oleh Pj Wali kota Moh Ali Kuncoro, pemkot menyalurkan bantuan makanan tinggi protein hewani untuk balita stunting di masing-masing Kelurahan.

"Jadi setiap hari Rabu, saya bersama Kadinkes, Baznas, dan Prameswari turun langsung untuk menyalurkan makanan tinggi protein hewani, seperti ayam, telur, susu, dan beras," ungkap Ali.

Selain bantuan permakanan rutin, Pemkot Mojokerto melalui Dinas P2KB juga terus berinovasi dengan memformulasikan berbagai program intervensi. Misalnya Canting Gulo Mojo (Cegah Stunting, Gerak Unggul Pemberdayaan Masyarakat Kota

Mojokerto), sebuah program terintegrasi yang dilakukan dari hulu ke hilir, mulai dari remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu pascasalin, hingga balita dengan melibatkan lintas sektor.

Inovasi tersebut terbukti berkontribusi dalam menekan angka stunting dari waktu ke waktu. Berdasarkan data Elekttronik Pencatatan Laporan Gizi Berbasis Masyarakat (EP-BGBM) angka stunting di tahun 2019 sebesar 9,04 persen turun menjadi 7,71 di tahun 2020. Kemudian di tahun 2021 menjadi 4,84 persen dan 3,12 persen di 2022. Hingga meniscayakan 2,04 persen per-Desember 2023.

Lebih lanjut, penerapan inovasi ini bahkan mengantarkan Kota Mojokerto sebagai Kota Terinovatif dalam Innovative Government Award (IGA) tahun 2023 yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri RI. Selain itu, pemkot juga mel-

ibatkan partisipasi aktif warga dengan membentuk kader motivator. Total 1623 kader motivator yang tersebar di setiap lingkungan warga. Sebelumnya, para kader telah mendapatkan edukasi sehingga dapat terlibat secara rutin dalam mempromosikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), termasuk edukasi terkait stunting di sekitar tempat tinggal masing-masing.

"Untuk stunting, salah satunya kami mengajak kader motivator agar ikut mengkampanyekan menu double protein untuk balita stunting. Selain itu, tiap kelompok juga kami bekali dengan antropometri kit agar bisa ikut memantau langsung perkembangan balita di lingkungan masing-masing. Sehingga kami bisa mendapat data by name by address yang valid," terang Kepala Dinas Kesehatan P2KB dr. Farida Mariana. (kmf/met)

Kota Denpasar Tetapkan Pajak Hiburan 15%

Denpasar, SMN - Pemkot Denpasar menetapkan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atau yang dikenal dengan pajak hiburan sebesar 15 persen.

Keputusan tersebut diambil setelah dilangsungkan dengar pendapat bersama para pelaku usaha wajib pajak terkait penerapan pajak hiburan berdasarkan Undang Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah serta SE Mendagri tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu.

"Ya itu sesuai peraturan pemerintah dan SE Mendagri, bahwa kepala daerah dapat memberikan insentif fiskal kepada para pengusaha atau wajib pajak," kata Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai, saat dikonfirmasi, Jumat, 26 Januari 2024.

Dari rapat dengar pendapat yang mengundang 49 pelaku usaha wajib pajak di wilayah Kota Denpasar ini kompak mengusulkan agar kenaikan Pajak PBJT atau Hiburan ditetapkan 15 persen. Hal tersebut mengingat situasi yang berada pada



Ilustrasi - Hiburan malam

masa pemulihan pasca pandemi covid-19.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara yang hadir pada kegiatan itu juga menyetujui dan menetapkan Pajak PBJT sebesar 15 persen. Kebijakan tersebut juga sekaligus menjadi

insentif fiskal bagi pelaku usaha yang termasuk dalam wajib pajak hiburan.

"Selanjutnya akan dirancang Peraturan Wali Kota untuk diusulkan ke Pemerintah Pusat sebagai landasan penerapan kebijakan tersebut," jelasnya.

Wali Kota Jaya Negara ber-

harap dengan disetujuinya penerapan pajak hiburan sebesar 15 persen ini dapat mendukung pertumbuhan investasi di bidang hiburan, selain meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) juga diharapkan dapat menyerap tenaga kerja Kota Denpasar dengan optimal. (ntro)

Tanggulangi Banjir...

Sambungan dari hal. 1

tersebut.

Jembatan yang diresmikan ialah jembatan usaha tani milik desa yang kerap menjadi penyebab terjadinya banjir di Tempuran. Peresmian jembatan itu dilakukan langsung oleh bupati Ikfina dan didampingi oleh kepala dinas DPMD Kabupaten Mojokerto, Kabag Administrasi Pembangunan, Forkopimca Sooko dan Kepala Desa Tempuran.

"Akhirnya kita bisa membuat jembatan pertanian Tempuran ini lebih baik dari jembatan sebelumnya, dan semoga dengan adanya jembatan yang baru ini masalah banjir di desa Tempuran bisa segera teratasi," Ucap Bupati Ikfina pada sambutannya.

Banjir di desa tersebut memang menjadi masalah serius terutama bagi para petani, karena lahan dan kawasan sawah di

daerah itu posisinya lebih rendah daripada sungai. Sehingga saat volume air naik, maka areal sawah bisa dipastikan terendam dan terancam gagal panen.

"Kondisi jembatan yang dulu itu pendek dan dangkal, menyumbat aliran sungai, jadi sedimen dan eceng gondok yang berada dalam sungai tersangkut, dan membanjiri sawah dan pemukiman warga Tempuran, maka dari itu jembatan ini kami tinggikan, agar terbebas dari banjir dan masih bisa difungsikan sebagai satu-satunya akses bagi petani di desa Tempuran," jelasnya.

Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Mojokerto ini juga menyampaikan komitmennya untuk membebaskan Desa Tempuran dari ancaman banjir tahunan.

"Kami sudah mengundang sekaligus berkoordinasi dengan

kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas untuk membahas bagaimana caranya agar Tempuran ini tidak banjir lagi, karena jujur saya tidak ingin lagi Desa Tempuran ini banjir lagi," tegasnya.

Pada akhir sambutannya, ia berharap eceng gondok yang berada di sepanjang sungai bisa dimanfaatkan dan diolah menjadi sesuatu yang bernilai jual.

"Bapak-ibu, eceng gondok ini kalau mau dimanfaatkan, bisa jadi uang, asal satu syaratnya, mau bekerja keras. Yang paling mudah, eceng gondok ini bisa dimanfaatkan sebagai anyaman untuk packing atau kemasan makanan. Jadi mari, khususnya warga Tempuran dan Ngingasrembyong untuk mulai memanfaatkan eceng gondok sebagai salah satu mata pencaharian tambahan," pungkasnya. (kmf/met)

Realisasi Investasi Jatim Tahun 2023 Tembus Rp145,1 Triliun, Gubernur Khofifah: Pertama Kali dalam 5 Tahun Terakhir



realisasi investasi periode Oktober - Desember 2023 / Triwulan IV 2023 yang mencapai Rp 45,0 triliun atau meningkat sebesar 45,6% (y-o-y) dan 15,7% (q-to-q)," terangnya.

"Nilai tersebut setara 129,6% dari target Perubahan RKPD Tahun 2023, sebesar Rp 112 triliun, atau setara 115,2% dari target Nasional (Rp. 126 Triliun). Realisasi investasi tahun ini menyerap tenaga kerja sebanyak 236.769 orang dengan rincian 1.284 tenaga kerja asing dan 235.485 orang tenaga kerja Indonesia," lanjutnya.

Lebih jauh, Khofifah menjelaskan kontribusi PMA dan PMDN dalam realisasi investasi Jatim tahun 2023, berturut-turut sebesar 48,4% dan 51,6%. Presentase itu setara dengan Rp70,2 triliun realisasi PMA dan Rp74,9 triliun realisasi PMDN. Berdasarkan data ini, perlahan-lahan gap antara realisasi PMA dan PMDN semakin menipis.

"Peluang berinvestasi di Jawa Timur terbukti terbuka baik bagi luar negeri maupun dalam negeri yang dapat memperluas keterbukaan lapangan kerja, hal ini selaras dengan marwah Jatim Kerja - memperluas lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi di Jawa Timur," tandasnya.

Gubernur Khofifah menekankan, bahwa lonjakan realisasi investasi tahun ini tidak lepas dari tingginya realisasi proyek hilirisasi yang tercatat Rp52,1 triliun atau setara 35,9 persen dari realisasi investasi tahun 2023.

"Perlu digarisbawahi bahwa proyek hilirisasi tidak hanya smelter tembaga, namun juga termasuk proyek industri kayu dan turunannya, industri kimia farmasi dan turunannya serta perkebunan, kelautan, perikanan dan kehutanan beserta industri pengolahannya" ungkapnya.

Realisasi investasi ini, lanjut Khofifah, juga didorong dari hilirisasi di berbagai bidang usaha. Diantaranya hilirisasi batu bara dengan PMA mencapai US\$ 2.612 juta, dan PMDN mencapai Rp3.206, 5 miliar, hilirisasi

minyak bumi dan gas alam dengan PMA mencapai US\$ 297,4 juta.

Selanjutnya, PMDN mencapai Rp2.661,8 miliar, juga hilirisasi perkebunan, kelautan, perikanan dan kehutanan (PKPK) dengan PMA mencapai US\$ 159,4 juta dan PMDN mencapai Rp 4.667,2 miliar.

"Hilirisasi yang terus kita dorong sesungguhnya sudah inline dengan kebijakan dari pemerintah pusat, dan realisasi sektor hilirisasi mencapai 35,9 persen dari total realisasi tahun 2023," terangnya.

Ke depan, Khofifah meminta perlu dilakukan akselerasi pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, aksesibilitas jalan sebagai penopang pusat - pusat kegiatan ekonomi baru di luar Jawa. Hal ini bisa menarik investor ke Jatim.

"Sehingga akan menarik investasi di luar Pulau Jawa, terutama dalam hal hilirisasi baik mineral dan logam maupun perkebunan, kelautan, perikanan dan kehutanan," ucapnya.

Di akhir Khofifah menekankan fokus utama adalah tetap menjaga dan meningkatkan iklim investasi khususnya investasi hijau yang berkelanjutan. Selain itu juga dengan mengedepankan penggalangan potensi investasi sesuai arahan Kementerian Investasi berkaitan dengan peta jalan hilirisasi investasi strategis hingga tahun 2040.

"Kita harap berbagai upaya yang terus dilakukan seperti digitalisasi layanan perizinan dan informasi potensi investasi dapat meningkatkan iklim berinvestasi di Jawa Timur, dan menjadikan Jawa Timur sebagai primadona investor dalam menanamkan modalnya," ungkapnya.

"Sekaligus dapat menciptakan multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan serta keterbukaan lapangan kerja di Jawa Timur, oleh karena itu melibatkan UMKM dalam implementasi berbagai proyek ini sangat dibutuhkan," pungkash Khofifah. (*)

Pemkab Tulungagung Targetkan IPM Pada Tahun 2025 Naik Jadi 74,64



Pj Bupati Heru Suseno menandatangani berita acara pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025

Tulungagung, SMN - Pemkab Tulungagung pada tahun 2025 mendatangi menargetkan indeks pembangunan manusia (IPM) menjadi 74,64. IPM Kabupaten Tulungagung tersebut dalam dua tahun terakhir terus meningkat dan masuk pada kategori tinggi.

"Target IPM di tahun 2025 itu menjadi bagian dari komitmen bersama untuk mencapainya," ujar Pj Bupati Tulungagung, Heru Suseno, usai Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 di Ruang Prajamukti Kantor Bupati Tulungagung, Kamis (25/1).

Menurut dia, dalam pencapaian target itu harus ada harmonisasi antara eksekutif dan legislatif. "Ada harmonisasi kepentingan yang harus kita samakan terkait pencapaian target," sambungnya.

Sebelumnya, Pj Bupati Heru Suseno memberikan pada tahun 2025 tidak hanya IPM saja yang ditargetkan meningkat, tetapi juga indikator kinerja lainnya. Seperti di antaranya, pertumbuhan ekonomi ditargetkan bisa mencapai angka 5,4

persen, indeks infrastruktur menjadi 0,726, indeks kualitas lingkungan hidup di angka 63,38, indeks reformasi birokrasi sebesar 70,46 dan angka kemiskinan ditargetkan bisa mencapai angka 6,44 persen.

Ia berharap dalam Forum Komunikasi Publik RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, para pemangku kepentingan yang hadir dalam forum tersebut dapat memberi masukan terhadap arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Tulungagung.

"Kami mengajak kepada semua peserta forum untuk tidak hanya berpikir normatif, akan tetapi kita harus dapat berpikir cerdas, inovatif dan kreatif agar dapat melakukan lompatan-lompatan capaian target kinerja sehingga target-target pembangunan akan dapat tercapai bahkan terlampaui," paparnya.

Pj Bupati Heru Suseno juga meminta dalam penyusunan rancangan awal RKPD Kabupaten Tulungagung tahun 2025 harus dilaksanakan dengan lebih cermat, terintegratif dan memperhatikan. Selain, pe-
ntentuan program dan kegiatan

harus bersifat quick wins (langkah inisiatif yang mudah dan cepat) yang menyentuh masyarakat secara langsung.

Sementara itu, Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, menyatakan lembaga legislatif akan terus mendorong Pemkab Tulungagung dalam mencapai target kinerja pembangunan.

"Tetapi ingat dalam mencapai target itu tetap jangan sampai meninggalkan hal strategis yang dibutuhkan masyarakat," tuturnya.

Marsono selanjutnya berharap ada tindak lanjut setelah dilakukan Forum Konsultasi Publik RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025. DPRD Tulungagung akan pula terus melakukan pengawasan.

"Fungsi kami di dewan selain budgeting dan legislasi juga controlling. Kami tentu akan mengawasi tindak lanjutnya," tandasnya.

Hadir pula dalam Forum Komunikasi Publik RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jatim, Benny Sampirwanto dan Sekda Tulungagung, Sukaji. (hms/kan)

Realisasi Investasi Jatim Tahun 2023 Tembus Rp145,1 Triliun, Mampu Lampaui Target RPJMD dan Nasional

Surabaya, SMN - Realisasi investasi di Jawa Timur semakin melejit pada tahun 2023. Berdasarkan rilis yang dikeluarkan Menteri Investasi / Kepala BKPM RI, Bahil Lahadalia pada 24 Januari 2024, realisasi investasi PMA dan PMDN Jawa Timur di Triwulan IV 2023 mencapai Rp. 45,0 Triliun. Sedangkan secara kumulatif, realisasi investasi Jatim periode Januari - Desember 2023 mencapai Rp145,1 triliun.

Atas capaian tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa realisasi investasi tahun 2023 telah melampaui target rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Capaian tersebut juga mampu melampaui target nasional.

"Alhamdulillah, kita patut

Lakukan Aroeseeding Pasca Karhutla, Gubernur Khofifah dan TNI AU Tebar 1.544,4 Kg Benih Tanaman untuk Hijaukan Kembali Kawasan Arjuno-Welirang

Malang, SMN - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Komandan Landasan Udara Abdulrachman Saleh Marsma TNI Firman Wirayuda melakukan penebaran benih melalui udara (Aroeseeding) di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Arjuno-Welirang pada Kamis (25/1).

Proses aroeseeding dimulai dari Skuadron 4 Wing 2 Landasan Udara Abdulrachman Saleh yang ditandu dengan penyerahan benih Mahoni oleh Gubernur Khofifah pada Marsma TNI Firman Wirayuda. Yang kemudian dilanjutkan dengan Aroeseeding menggunakan pesawat Cassa TNI AU dari ketinggian sekitar 10.000 kaki.

Gubernur Khofifah mengatakan, karhutla kawasan Gunung Arjuno-Welirang dan Anjasmoro telah menyebabkan lahan hutan seluas 4.850 hektar terbakar pada 26 Agustus sampai 13 September 2023.

Untuk itu, Aroeseeding ini dilakukan sebagai tindak lanjut penanganan karhutla melalui upaya penghijauan kembali kawasan Gunung Arjuno-Welirang.

"Aroeseeding ini dilakukan untuk daya dukung alam dan keanekaragaman hayati lingkungan kita yang harus terus kita maksimalkan dan dijaga," ungkapnya.

Total dalam kesempatan ini disebar 1.544,4 kg benih yang terdiri dari 26 jenis benih. Benih-benih ini disiapkan oleh



Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Komandan Landasan Udara Abdulrachman Saleh Marsma TNI Firman Wirayuda melakukan penebaran benih melalui udara (Aroeseeding) di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Arjuno-Welirang pada Kamis (25/1).

Indonesia seluas 25 hektar. Penebaran benih via udara menjadi ikhtiar Pemprov Jatim melalui BPBD untuk menjaga keanekaragaman hayati di kawasan setempat. Dengan harapan, struktur vegetasi dan habitat satwa di wilayah tersebut akan serupa dengan sebelum terjadi kebakaran. Metode ini pun digunakan mengingat lanskap penebaran benih yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

"Dengan ini kita kembalikan tanaman yang sesuai dengan topografi daerah, topografi tanah, dan wilayah supaya benih-benih ini memulihkan kondisi wilayah sebelum karhutla terjadi," jelas Khofifah.

Di akhir, Gubernur Khofifah pun mengucapkan terima kasih kepada TNI AU, Lanud Abd.

Saleh, dan semua pihak yang telah mendukung dan memfasilitasi upaya pemulihan ekosistem Tahura Raden Soeryo.

Sementara itu, Marsma TNI Firman Wirayuda menyatakan dukungannya terhadap upaya reforestasi ini. Ia optimis bahwa wilayah terdampak karhutla akan kembali hijau dan lestari sehingga mendatangkan manfaat bagi Jawa Timur.

"Penanggulangan dari kebakaran yang sulit dijangkau melalui jalur darat sehingga perlu melalui udara, kami sangat mendukung upaya dan sinergi bersama ini," ujarnya.

"Kami percaya niat yang baik akan memberikan hasil yang baik sehingga hutan Jawa Timur kembali hijau dan kelestarian lingkungan tetap terjaga," sambungnya. (*)

Pj Bupati Jombang Launching DD dan ADD Serta PDRD Tahun 2024

Jombang, SMN - Pj Bupati Jombang, Sugiat S.Sos, M.Psi.T membuka kegiatan launching Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) serta Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kabupaten Jombang tahun 2024 di Pendapa Kabupaten Jombang, Selasa (23/01). Kegiatan ini dihadiri oleh kepala desa serta camat di Kabupaten Jombang.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh para pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Jombang dan juga Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jombang, Sholahudin Hadi Sucipto beserta jajarannya serta BPJS Ketenagakerjaan Jombang, dan juga pejabat Bank Jombang.

"Kita hari ini melaunching penyaluran Dana Desa, ADD, dan PDRD. Kita apresiasi yang sudah cepat mencairkan. Supaya yang lain juga mengikuti seperti itu," kata Pejabat Bupati Jombang.

"Saya selalu ingat kepada teman-teman, sebagai penerima Dana Desa, desa ini sebagai surga sekaligus sebagai neraka. Mungkin surga itu kenapa, bisa mensejahterakan masyarakat melalui Dana Desa dan ADD, itu bagus. Tapi kalau tidak sesuai aturan pengunaannya, menjadi neraka," ungkap Sugiat.

Oleh karenanya, Pejabat Bupati Jombang menambahkan, dirinya selalu mengingatkan kepada para kepala desa agar tidak melanggar aturan.

"Sesuaikan dengan aturan, sesuai dengan ketentuan," tandas Pejabat Bupati Jombang.

Pada kesempatan ini, Pejabat Bupati Jombang didampingi Kepala DPMD Kabupaten Jombang juga menyerahkan penghargaan kepada kecamatan dan desa-desa di Kabupaten Jombang yang telah melakukan percepatan penyerapan DD, ADD, dan juga PDRD.

sebagai surga sekaligus sebagai neraka. Mungkin surga itu kenapa, bisa mensejahterakan masyarakat melalui Dana Desa dan ADD, itu bagus. Tapi kalau tidak sesuai aturan pengunaannya, menjadi neraka," ungkap Sugiat.

Oleh karenanya, Pejabat Bupati Jombang menambahkan, dirinya selalu mengingatkan kepada para kepala desa agar tidak melanggar aturan.

"Sesuaikan dengan aturan, sesuai dengan ketentuan," tandas Pejabat Bupati Jombang.

Pada kesempatan ini, Pejabat Bupati Jombang didampingi Kepala DPMD Kabupaten Jombang juga menyerahkan penghargaan kepada kecamatan dan desa-desa di Kabupaten Jombang yang telah melakukan percepatan penyerapan DD, ADD, dan juga PDRD.

Sementara itu, dalam laporannya, Kepala DPMD Kabupaten Jombang, Sholahudin Hadi Siswoyo menjelaskan, berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh desa, desa berper-

an untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, melalui pembangunan desa yang dilaksanakan secara berkelanjutan.

"Mengoptimalkan partisipasi masyarakat, diharapkan dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Terwujudnya ketahanan ekonomi, ketahanan sosial di tingkat desa," kata Kepala DPMD Kabupaten Jombang.

Dikatakannya, berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 174 Tahun 2023 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa, di tahun 2023, di Kabupaten Jombang sudah tidak ada lagi desa yang tertinggal, desa tertinggal, dan desa berkembang.

"Sekarang ini yang ada hanya 211 dengan status maju, dan 91 status mandiri," ujar Sholahudin Hadi Siswoyo.

"Keberhasilan ini merupakan kerjasama kita semuanya. Khususnya kepala desa-kepala desa serta stakeholder yang ada di desa, bapak/ibu camat dan juga pemerintah kabupaten," pungkashnya. (kmf/kan)



Pj. Sugiat saat melaunching penyaluran Dana Desa, ADD, dan PDRD tahun 2024 di Pendapa Kabupaten Jombang